

**PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KOTA BLITAR DALAM
PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1) Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Brawijaya
dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan**

Disusun Oleh:

MOCHAMAD AGIN

125120602111005



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan rahim-Nya dan senandung selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menemani penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*”**, yang disusun oleh peneliti untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Pada Penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan bimbingan, kritik saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

Pertama, *Ibuk* Siti Maesaroh dan Bapak Moch Tarom, orang tua yang selalu sangat amat dicintai, selalu memberikan semangat, petuah, kata bijak, kritik serta do'a tiada henti bagi penulis dalam proses studi. Penulis menyadari bahwa doa dan restu orang tua itu lebih penting daripada segempol emas ataupun setupuk uang, selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis Chusnil Mubarak, Avis Zunaida, Amir Syaifudin semoga terus berjuang meraih mimpi dan menjadi kebanggaan untuk Bapak dan Ibu.

Kedua, Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si Dosen pembimbing satu yang selalu memotivasi, mengingatkan untuk segera diselesaikan skripsinya. Dosen yang selalu memberikan ilmu di kampus ataupun di luar kampus. Dosen yang memberikan bantuan dalam hal tulis menulis yang kemudian penulis bisa

menyelesaikan skripsi. Beliau merupakan sosok yang hebat, selalu bersahabat dengan mahasiswa.

Ketiga, Andi Setiawan, S.IP., M.Si. Dosen pembimbing dua dalam menyelesaikan proses skripsi penulis. Dosen yang ramah dan baik. Memberikan ilmu kepada penulis atau kepada mahasiswa lain dengan karakteristiknya. Beliau merupakan sosok dosen yang cerdas menjaga tutur kata dan sikap. Begitu banyak saran dan masukan cemerlang yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Keempat, Gus Achmad Shampton Masduqi beserta keluarga besarnya ataupun santri-santri di Pesantrennya, Nurul Huda. Beliau merupakan sosok yang selalu memberikan motivasi, cermin kehidupan bahwa hidup itu bermanfaat kepada sesama dan selalu mengajarkan jangan mudah menjustifikasi orang. Beliau adalah sosok yang sangat penulis hormati dan guru-guru lainnya, yang secara tersirat lewat tulisan, petuah, dan kitab klasik, yang kemudian penulis menyimpulkan bahwa ilmu itu tidak ada habisnya, jangan pernah berhenti mencari ilmu.

Kelima, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan 5 (lima) kali input matakuliah skripsi, kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah dua setenga tahun lebih untuk merampungkan penelitian ini, namun dalam prosesnya penulis mengalami banyak kendala yang timbul dari penulis sendiri seperti kemalasan dan kejenuhan pada titik tersebut penulis membutuhkan motivasi dan dukungan untuk mampu bangkit dan memulai kembali apa yang harus diselesaikan (skripsi) selama itu pula ada seseorang yang selalu setia menemani

dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.

Terimakasih Dini Isnanda Kusuma Dewi.

Keenam, Keluarga HIMAP UB 2013 Terutama kepada BPH-PH Ingrid, Novia, Riska, Dea, Khairina, Annisa, Clara, Anji, Arif dan rekan rekan yang lain-lain, penulis mengucapkan terima kasih ilmu dan pengalamannya karena tanpa adanya keberadaan kalian tidak mungkin satu tahun kepengurusan dilalui dengan penuh makna.

Ketujuh, RB-31. Teman-teman seperjuangan dari UKM Pramuka Racana Brawijaya yang sudah menemani penulis dalam berproses dan berkarya. Dewi Masitoh, Ofil, Deny, Nisa, Gema, Yum, Erli, dan yang lainnya juga kepada Kak Adlan, Kak Pandu, Kak Gufron, Kak Souma, Kak Naning, Kak Hernaning, dan alm. Romo Brahma Supandi terimakasih sudah memberikan warna dalam hidup dan penulis mengucapkan teman-teman Arrsmaga angkatan 7 serta keluarga besar AKB, semoga selalu menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun berada menjadi seperti pohon nyiur .

Kedelapan, Sabar Tandingan. Tidak selamanya teman itu baik dan tidak selamanya teman itu buruk tapi kita tetap *konco* mereka orang yang memberikan penafsiran pada nilai-nilai pertemanan kami, diantaranya, Abajadun Hawazun,

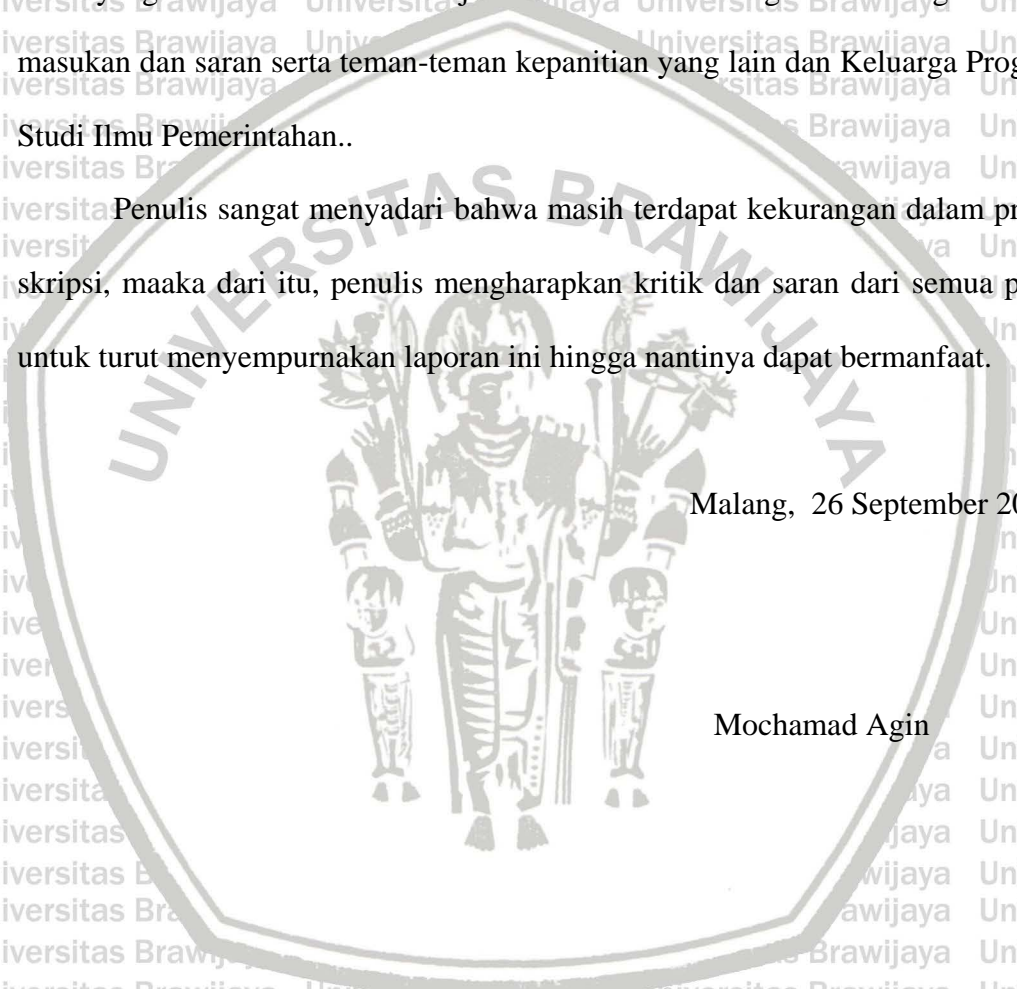
Satria, Anji, Dea, dan Nikmah. Terimakasih juga kepada *founding father* Sabar Mas Mayuko, Mbak Arfi, Mbak Dian Novi dan rekan IMM Komisariat Fuurinkazan Widya, Keri, Azhar, Mukhtar, Mas Adi, dan Kandan, Yunda yang selalu mampu meberikan angin segar baik didalam maupun diluar ruangan.

Kesembilan, terimakasih banyak kepada teman-teman mengaji, ada Ido, Antasena, Hilmi, Vani, Taufik, Mukhtar, Depta, Angga, Hawazun, Mba Tyas, Bu Ima, Mba Adel, Mba Ayin. Terimakasih juga kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan 2010, 2011, 2012 Jody, Syahrul, Dian, Gias, Syarif, Ilma, Oni dan 2014 yang selalu menerima menjadai salah satu keluarga dan sering meminta masukan dan saran serta teman-teman kepanitian yang lain dan Keluarga Program Studi Ilmu Pemerintahan..

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses skripsi, maaka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk turut menyempurnakan laporan ini hingga nantinya dapat bermanfaat.

Malang, 26 September 2017

Mochamad Agin



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR DIAGRAM | xi |
| DAFTAR GRAFIK | vii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR ISTILAH | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.4.1 Manfaat Akademis | 12 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Kerangka Teoritik | 18 |
| 2.2.1 Teori Pembangunan | 18 |
| 2.3 Konsep Pembangunan Berkelanjutan | 22 |
| 2.3.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan | 22 |
| 2.3.2 Sejarah Lahirnya Pembangunan Berkelanjutan | 24 |
| 2.3.3 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | 25 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 29 |



| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 31 |
| 3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian | 33 |
| 3.3 Jenis Data | 34 |
| 3.3.1 Data Primer | 35 |
| 3.3.2 Data Sekunder | 35 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.4.1 Metode Observasi | 39 |
| 3.4.2 Metode Wawancara | 40 |
| 3.4.3 Kajian Pustaka | 42 |
| 3.4.4 Metode Dokumentasi | 42 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Blitar | 45 |
| 4.1.1 Sejarah Kota Blitar | 45 |
| 4.1.2 Aspek Geografis dan Administratif Kota Blitar | 46 |
| 4.2 Pemerintah Kota Blitar | 51 |
| 4.2.1 Gambaran dan Peran Bappeda, BLH, Dinas PU dan Dinas Pertanian | 52 |
| 4.3 Pembangunan Kota Blitar | 56 |
| BAB V PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DI KOTA BLITAR DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 60 |
| 5.1. Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif <i>Sustainable Development</i> | 60 |
| 5.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Manusia | 64 |
| 5.1.2 Pemeliharaan Integritas Ekologi | 77 |
| 5.1.3 Keadilan Sosial | 84 |



| | |
|---|------------|
| 5.1.4 Kesempatan Menentukan Nasib Sendiri | 98 |
| BAB V PENUTUP | 105 |
| 6.1 Kesimpulan | 105 |
| 6.2 Rekomendasi | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Blitar 47

Gambar 5.1 Alon-alon Kota Blitar 79

Gambar 5.2 Peta Perubahan Iklim Kota Blitar..... 88

Gambar 5.3 Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kota Blitar 89



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1 Angka Kejadian DBD Per-1000 Kota Blitar 88

Diagram 5.2 Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Blitar 97





DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Perubahan Lahan Pertanian 67



DAFTAR ISTILAH

Adiwiyata : Merupakan nama program pendidikan lingkungan hidup.

Development : Kegiatan yang merujuk kepada pembangunan.

Ekologi : Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos ("habitat") dan logos ("ilmu"). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Kelurahan : Wilayah kerja Lurah sebagai SKPD dalam wilayah kecamatan di lingkungan pemerintah kota.

Konservasi : Pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, (Inggris) Conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah: ... Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam

Lahan : Lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia

KLHS : Kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.

KRP : Kebijakan, Rencana dan Program yang disusun sebagai landasan untuk berkegiatan bagi pemerintah.

Pemerataan : Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu

Pemerintahan : Semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara serta merupakan system struktur dan organisasi sebagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Perda : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota.

Perwali : Peraturan Walikota (Perwali) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Repelita : Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.

RTH : Area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Sustainable : Kemampuan untuk tetap mempertahankan sumber daya dengan mengatur penggunaan, perkembangan dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan fisik dengan tidak menyebabkan kerusakan suatu ekologi sehingga generasi masa depan tetap dapat menikmati atau mengkomsumsi sumberdaya yang tersedia saat ini.

Undang-undang:

Undang-Undang atau Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudharto. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press

James A. Black dan Bean J. Champion. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*, Bandung, CV. Alfabeta, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013

Anthoni J.C dan James C. Snyder. *Perencanaan Kota*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1989

Sudharto P. Hadi. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Jogja. Gajahmada University Press

Fauzi A. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia 2004

Fauzi A. *Rethinking Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam. Artikel dalam Buku Orange Book ; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global*. Bogor. IPB Press. 2009.

Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gajah Mada Press. : Yogyakarta

Gustomy, Mohtar. 2014. *Bahan Bacaan : Teori Pembangunan. Prodi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya. 2014.

Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Dokumen

Buku Rencana Kerja 2011-2020 Bappeda Kota Blitar

Buku Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Buku Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Buku Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

PPID 2015-2025 Kota Blitar

Rencana Tata Ruang Wilaya Kota Blitar Tahun 2011-2030

Buku Rencana Strategis 2011-2020 Kota Blitar

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Blitar 2015

Rencana Aksi Kota Hijau Kota Blitar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penelitian

M. Fani Cahyandito. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekologi, Ekonomi,
Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*.2006.

Selvia Rosy Erdha Okta Reza. *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan
Penegelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus pada
badan Lingkungan Hidup Kota Malang)*.2014. Malang. Universitas
Brawijaya.

Susi Lastrika Sinaga. *Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang dalam
Pembangunan Berkelanjutan (studi pada Bappeda Kota Malang)*.2012.
Malang. Universitas Brawijaya

Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun. *Evaluasi Dampak Pembangunan*

*Kawasan Bumiaji Berbasis Agroindustri Menuju Terwujudnya Upaya
Pelestarian Lingkungan Hidup (suatu Kajian Sustainable Development
berwawasan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Batu).*

2012. Depok. Universitas Indonesia.

M Rozikin. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota
Batu.* 2012. Malang. Universitas Brawijaya.

Wawancara

Wawancara dengan Christina Ratnawati, Kepala Divisi Produksi Tanaman Pangan
dan Holtikultural, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar,
19 November 2016 pukul 14.15 di Lobi Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Blitar.

Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub Bidang
Lingkungan Hidup. Bappeda Kota Blitar, Pada Tanggal 17 November
2016 pukul 10.30 di Ruang Tamu Bappeda Kota Blitar

Wawancara dengan Bambang selaku Staff Dinas Kepemudaan, Kebudayaan,
Olahraga dan Parawisata pada Tanggal 24 November 2016 pukul 11.45 di
Ruang Bapak Bambang

Wawancara dengan Ir Herlyn Krisnawati selaku Kepala Prasarana RTRW
Bappeda Kota Blitar pada Tanggal 22 November 2016 pukul 10.45 di
Ruang Lobi Bappeda Kota Blitar.

Wawancara dengan Imam Sholikin selaku Kasi Pemanfaatan Ruang Kota. Pada
Tanggal 11 November 2016 pukul 12.00 di Ruang Bagian Umum Dinas
PU dan Perumahan Kota Blitar

Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub-Bidang
Lingkungan Hidup. Pada Tanggal 17 November 2016 pukul 09.35 di
Ruang Tamu Bappeda Kota Blitar

Website

www.blh.blitarkota.go.id

www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8105

<http://www.blitarkota.go.id/>

<https://www.timesindonesia.co.id/baca/108883/20151119/142302/kelurahan-ini->

[masuk-daerah-termiskin-di-kota-blitar/](#)

[Wartapostonline.com/kota-blitar-raih-adipura-dua-belas-kali-berturut-turut](#)



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Perubahan Luas Lahan Persawahan dari Tahun 2009-2015 | 5 |
| Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu | 16 |
| Tabel 2.2 Prinsip-prinsip <i>Sustainable Development</i> | 25 |
| Tabel 3.1 Data Sekunder yang Mendukung dalam Penelitian | 36 |
| Tabel 3.2 Daftar Informan Peneliti | 41 |
| Tabel 4.1 Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar .. | 48 |
| Tabel 4.2 Jumlah Wisatawan Pertahun | 58 |
| Tabel 5.1 Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar | 68 |
| Tabel 5.2 Pengelolaan Sampah | 73 |
| Tabel 5.3 Penggunaan Lahan di Kota Blitar | 78 |
| Tabel 5.4 Jumlah Wisatawan DOMestik dan Mancanegara | 92 |
| Tabel 5.5 Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Blitar | 95 |
| Tabel 5.6 Capaian Kualitas Udara di Kota Blitar | 96 |
| Tabel 5.7 Perkembangan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | 103 |



Pembangunan Lingkungan Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*.

Mochamad Agin

(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Brawijaya, Malang)

(e-mail:m.agin@gmail.com)

Environment Development in Blitar City from the Perspective of Sustainable Development. This research explains the development of environment in Blitar City that uses perspective of sustainable development of view about the activities carried out systematically and planned in the framework of improving the welfare, quality of life and environment of humanity without reducing access and opportunity to future generations to enjoy and make use of it. The environmental problems that occurred in the city of Blitar include land conversion, positive trends of environmental development, environmental issues. The process of research and retrieval of information is done by observation method, in-depth interview, literature review and documentation. While the results are in the can by researchers, First the fulfillment of human needs include material needs and non-material that occurred in the city of Blitar environmentally systematic development has been met but there are still obstacles in which the role of all actors to actively involved. The two maintenance of ecological integrity include conservation and reduced overall consumption in the maintenance of ecological integrity in case in Blitar City there are still obstacles in the fulfillment of green open space that is still below 30% so it has not been fulfilled as mandated by the Law, and in need of changing consumption patterns. Third, social justice includes present justice and future justice The main problem in this indicator is climate change impacting 6 urban villages that are still vulnerable. Fourth, the ability to self-determination consists of the realization of an independent society and the participation of democracy is manifested by the fulfillment of the role of society and the issuance of Perwali as the juridical foundation.

Keywords: Development, Sustainable Development, Environment.

Abstrak: Pembangunan Lingkungan Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*.

Penelitian ini menjelaskan pembangunan lingkungan di Kota Blitar yang menggunakan perspektif *sustainable development* yang merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Adapun permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Blitar meliputi alih fungsi lahan, tren positif pembangunan lingkungan, isu-isu lingkungan. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, kajian pustaka dan dokumentasi. Sementara itu hasil yang di dapat oleh peneliti, *pertama*, Pemenuhan Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan materi dan non-materi yang terjadi di Kota Blitar pembangunan lingkungan secara sistematis sudah terpenuhi namun masih terdapat kendala dimana peran dari semua aktor untuk terlibat aktif. *Kedua* pemeliharaan integritas ekologi meliputi konservasi dan mengurangi konsumsi secara keseluruhan dalam pemeliharaan integritas ekologi dalam kasusnya di Kota Blitar masih terdapat kendala dalam pemenuhan RTH yang masih dibawah 30% sehingga belum terpenuhi sesuai amanat Undang-undang, dan di perlukan perlu adanya perubahan pola konsumsi. *Ketiga*, keadilan sosial meliputi keadilan masa kini dan keadilan masa depan permasalahan yang utama pada indikator ini adalah perubahan iklim berdampak kepada 6 kelurahan yang masih rawan. *Keempat*, kemampuan menentukan nasib sendiri terdiri dari terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipasi demokrasi terwujud dengan diwadahnya peran masyarakat dan dikeluarkannya Perwali seagai landasan yuridis.

Kata Kunci: Pembangunan, *Sustainable Development*, Lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas Pembangunan Lingkungan dalam Perspektif *Sustainable Development* Studi Kasus di Kota Blitar. Menurut Budimanta, *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya¹. Bermakna bahwa mengenai peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan harus menjadi bagian dari strategi pengembangan perkotaan.

Dalam konteks pembangunan lebih khusus pembangunan lingkungan di Kota Blitar menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya, *pertama* alih fungsi lahan. Data yang diperoleh dari Dinas terkait Tanaman dan Holtikultural Blitar menunjukkan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun sebanyak 51Ha selama periode 2004 sampai 2010 atau terjadi alih fungsi lahan pertanian sebanyak 4,28% dibandingkan dengan tahun 2004. Jumlah mutasi lahan pertanian terbanyak terjadi pada tahun 2006 sejumlah 26Ha dan terkecil terjadi pada tahun 2009 tidak ada mutasi lahan². Setelah tahun 2010 terjadi alih fungsi lahan setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultural:

*“Alih fungsi lahan setiap tahun menurun dari lima sampai sepuluh hektar, alih fungsi tersebut faktor utamanya yang jelas perumahan, fasilitas umum, dan gudang. Karena arah yang jelas adalah barang dan jasa”*³

¹ Soegijarno, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, URDI, Jakarta, 2005, hlm.377.

² Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH).hlm.18.

³ Wawancara dengan Christina Ratnawati Selaku Kasi Produksi Tanaman pangan dan Holtikultural. Pada Tanggal 19 November 2016

Kedua, pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Blitar dilihat dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif dengan diperolehnya Anugerah Adipura⁴ selama dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2004 hingga 2016⁵. Namun diperolehnya Anugerah Adipura yang notabene penghargaan dalam bidang lingkungan masih belum diimbangi dengan salah satu unsur pendukung dimana seharusnya terdapat Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari seluruh luas wilayah dengan pembagian 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat⁶. Sementara itu di Kota Blitar RTH pada tahun 2015 yang terpenuhi baru mencapai 20,12% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khusus untuk RTH publik, pada Tahun 2015 mencapai 10,34%.

Ketiga, masih terdapat isu-isu lingkungan yang belum terselesaikan oleh Pemerintahan Kota Blitar, seperti yang tercantum pada KLHS Kota Blitar Tahun 2014⁷, diantaranya *pertama* luasan lahan terbangun semakin meningkat mengakibatkan berkurangnya luasan lahan pertanian, *kedua* adanya pengembangan perumahan/permukiman yang menyebabkan konversi lahan, terutama dari lahan pertanian subur dikeringkan menjadi lahan perumahan, *ketiga* hasil

⁴ Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 ada 54 daerah yang mendapatkan Anugerah Adipura, termasuk Kota Blitar.

⁵ Wartapostonline.com/kota-blitar-raih-adipura-duabelas-kali-berturut-turut/. Diakses pada 29 September 2016

⁶ Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat (1), RTH Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan di kelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, diantaranya taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Kemudian RTH Privat anantara lain kebun/halaman, rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Di ayat (2) proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain.

⁷ Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dan Peraturan Zonatasi Kota Blitar Tahun 2014.

pembuangan limbah dan sampah yang berasal dari limbah rumah tangga, kantor, hotel, rumah makan, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit mengakibatkan pencemaran pada kualitas air, *keempat* meningkatnya limpasan air karena peningkatan lahan terbangun yang menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah, *kelima* timbulnya polusi udara dan suara dikarenakan adanya perkembangan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa alasan mengapa peneliti tertarik mengambil tema tersebut di Kota Blitar. *Pertama* melihat dari permasalahan pembangunan lingkungan yang ada di Kota Blitar seperti permasalahan 3 (tiga) di atas. *Kedua* Kota Blitar adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terkecil kedua⁸, meskipun tergolong kota kecil pembangunan tidak kalah bersaing dengan kota-kota yang lainnya. Dalam rencana struktur perwilayahan ditingkat regional Jawa Timur, Kota Blitar telah menjadi salah satu Pusat Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Blitar Raya dengan wilayah Kabupaten Blitar sebagai wilayah pengaruhnya. Posisi ini menjadi potensi pembangunan kota terutama jika dilihat dari fungsi kota yang akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan tersier, yaitu perdagangan dan jasa, niaga, pendidikan, pemerintahan, *home industry*, dan akomodasi pariwisata. Seperti karakteristik pariwisata di Kota Blitar dengan objek wisata yang bersifat kebangsaan. Salah satu objek wisata yang ada di Kota Blitar adalah makam proklamator RI Ir. Soekarno. Keberadaan makam Bung Karno dan situs wisata kebangsaan lainnya menjadi faktor pendukung bagi perkembangan perekonomian di Kota Blitar yang juga berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan jasa, yang kemudian pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa membawa

konsekuensi logis berupa pertambahan lahan terbangun.

Ketiga, adalah pengambilan lokasi penelitaian. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi di daerah Kota Batu dengan fokus pembangunan berkelanjutan berbasis pada agroindustri, dan pembangunan berkelanjutan di Malang berbasis pada agropolitan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau *World Commission on Enviromental and Development* (WCED) mendefinisikan bahwa "*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" yang berarti bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri⁹. Terdapat dua konsen utama menurut WCED, *pertama* konsep tentang kebutuhan (*needs*) yang erat kaitannya dengan faktor ekonomi, yaitu penduduk suatu negara yang tergolong miskin yang perlu mendapatkan perhatian dari negara untuk mencapai kesejahteraan. *Kedua*, konsep tentang keterbatasan (*limitation*) yang lebih mengarah kepada keberadaan sumberdaya yang dimiliki oleh alam dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan nanti, maka diperlukan regulasi sebagai langkah mengatur penggunaan sumberdaya alam tersebut¹⁰.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi diatas, bahwa pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Develompment*) adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya seperti eksploitasi sumberdaya alam, arah investasi, orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan kesemuanya akan berada

⁸www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8105. Diakses pada tanggal 29 September 2016.

⁹Sudharto P. Hadi. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Jogja. Gajahmada University Press. hlm 2

¹⁰*Ibid.*

dalam posisi yang seimbang. Karena pembangunan yang berlangsung akan mengedepankan pemenuhan kebutuhan generasi terkini dengan tanpa mengindahkan kebutuhan generasi sumberdaya alam sudah habis karena eksploitasi maka generasi mendatang tidak akan mendapat sumberdaya yang sama seperti yang disediakan oleh alam pada Prinsip yang dimiliki pada konsep *sustainable development*, peneliti mengadopsi 4 (empat) definisi menurut Jacob yang dijadikan acuan untuk melihat penerapan *sustainable development* dalam tata kelola pembangunan di Kota Blitar. Berikut adalah empat prinsip *sustainable development* yang menjadi rujukan pendukung dalam penelitian¹¹:

a. Pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*)

Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yang disebut kebutuhan materi didalamnya termasuk sandang, pangan dan papan. Kebutuhan non-materi meliputi rasa aman, hak asasi manusia, memiliki kesempatan untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat. Kebutuhan non-materi dicerminkan kedalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan. Kebutuhan non-materi terkait erat dengan partisipasi demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kebutuhan non-materi ini terkait erat dengan komponen keempat yakni partisipatori demokrasi.

b. Pemeliharaan integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*)

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan memiliki 2 (dua) indikator, *pertama* adalah

masa sebelumnya. Maka dari itu solusinya adalah pembangunan ekonomi, sosial dan budaya harus diupayakan secara keberlanjutan dengan lebih berorientasi pada ketersediaan sumberdaya alam yang mampu memenuhi kebutuhan manusia kini dan nanti. mendatang, dimana ketika hari ini

koservasi maksudnya adalah perlindungan lingkungan. Lingkungan, baik sebagai sumber daya maupun ruang yang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumberdaya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Setiap usaha / kegiatan harus diatur agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sebagai ruang. Prinsip (b) ini sebenarnya sangat terkait dengan dengan prinsip (a) diatas, dimana kerusakan lingkungan akan mengambat pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan telah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri.

Kedua, prinsip mengurangi konsumsi.

c. Keadilan Sosial (*social equity*)

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan yang *pertama* adalah, keadilan masa kini menunjukkan perlunya keadilan dan kesetaraan akses dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Tanpa pemerataan akan menimbulkan ketimpangan, keadilan masakini. Kebjuga berdimensi luas termasuk didalamnya pengalokasian sumberdaya alam antara daerah dan pusat. *Kedua*, keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antara generasi dengan menghargai diversitas budaya dan kesetaraan jender. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) atas

¹¹ Sudharto P.Hadi.2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Hlm.6

sumberdaya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Komitmen untuk melindungi ekosistem itu sebenarnya harus tertuang dalam prinsip berbangsa dan bernegara yakni pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa *bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*.

- d. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*)

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipasi demokratis. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas dasar hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumberdaya alam. Sedangkan prinsip-partisipasi demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjelaskan tentang pembangunan lingkungan di Kota Blitar dalam perspektif *sustainable development*. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif analisis. Selanjutnya data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi BLH Kota Blitar, Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar Bappeda Kota Blitar dan masyarakat Kota Blitar. Terdapat juga lembaga lain seperti DPRD Kota Blitar sebagai *check and balance* terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk data sekunder Data sekunder yang dalam penelitian ini diantaranya :

- Regulasi bisa berupa undang – undang, Peraturan Daerah (Perda).
- Arsip-arsip dinas terkait seperti LAKIP, gambaran khusus pembangunan tata kelola pembangunan daerah, Majalah Pemda, *website* dinas terkait dan Pemda Kota Blitar.
- Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan walikota atau kepala dinas (SK) dan APBD pemerintah daerah Kota Blitar.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode untuk mengumpulkan data yakni wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman yang meliputi dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Pembangunan lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*.

1. Pemenuhan Kebutuhan Manusia

Indikator pertama dalam konsep *sustainable development* adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia secara umum bersifat primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan tersebut meliputi aspek materi dan non-materi.

a. Kebutuhan Materi

Berkaitannya dengan *sustainable development* dalam pembangunan lingkungan di Kota Blitar. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Blitar terdapat beberapa kendala yang harus dituntaskan. *Pertama*, persoalan jumlah penduduk. Masalah pemukiman menyangkut dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bersinggungan dengan pemukiman di Kota Blitar. Jumlah penduduk menjadi isu yang telah lama

menjadi isu penting, seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas kependudukan, perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Kota Blitar dan pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks, dan berbanding lurus dengan berbagai persoalan yang kompleks pula, semisal kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial dan sebagainya. Di bawah ini tabel jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun 2010-2014.

Tabel 5.3
Jumlah Penduduk Kota Blitar 2010-2014

| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|----|-------|-----------------|
| 1. | 2010 | 132.383 |
| 2. | 2011 | 133.492 |
| 3. | 2012 | 134.723 |
| 4. | 2013 | 135.702 |
| 5. | 2014 | 136.903 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2017.

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan setiap tahun, yang kemudian berdampak pada penyediaan lahan untuk tempat tinggal/tempat hunian. Seperti misal di Kelurahan Sukorejo yang menjadi wilayah termiskin di Kota Blitar¹². Lebih lanjut banyak warga Sukorejo berada di bantaran sungai dan masyarakat dengan kelas ekonomi kelas bawah yang berpenghasilan rendah. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas dan Tenaga Kerja¹³, bahwa:

“Ada dua lingkungan di Kelurahan Sukorejo, yakni di sekitar bantaran kali lahar Sukorejo dan warga di Balapan menjadi daerah dengan kondisi ekonomi sangat rendah jika

dibanding daerah lain di kota Blitar lainnya. Masyarakat di dua daerah itu tidak sama dengan masyarakat lain di Kota Blitar, di dua daerah ini masyarakatnya sangat miskin”.

Padatnya pemukiman ini menimbulkan terbentuknya kawasan kumuh. Seperti di pemukiman di belakang Pasar Legi, yang secara letak masih berada dalam Kelurahan Sukorejo. Pembangunan rumah berhimpit sampai tidak ada jarak. Bahkan tidak ada yang mempunyai teras, ada yang terasnya dijadikan sebagai kandang ayam.

Masalah kedua yaitu pembangunan perumahan di kawasan pertanian yang membabat lahan pertanian yang ada di tepi Kota Blitar tepatnya di sepanjang Jalan Mahakam dari ujung barat sampai ujung timur. Alhasil perumahan-perumahan tersebut tidak teratur. Maka dari itu pemerintah Kota Blitar dalam mengatasi masalah pembangunan harus memiliki peraturan untuk mengendalikan pembangunan yang mana telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Blitar. Namun materinya masih bersifat umum dan konseptual yang belum dapat dijadikan dasar menyangkut pembangunan di Kota Blitar. Lain sisi diperlukan peraturan yang lebih terperinci setiap zona kawasan pembangunan di Kota Blitar yaitu dengan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sangat berperan penting dalam pengendalian penataan ruang. Fungsinya sebagai perangkat pengendalian pembangunan dan memberi batasan pembangunan.

Selain salah satu sebab meningkatnya jumlah penduduk, kemudian kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat pula, sehingga berdampak pada lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas pertanian Daerah Kota Blitar telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun sebanyak 51 ha selama periode

¹²Diakses melalui <https://www.timesindonesia.co.id/baca/108883/20151119/142302/kelurahan-ini-masuk-daerah-termiskin-di-kota-blitar/> pada hari Rabu, 9 September 2017.

¹³ *Ibid.*

dari tahun ke tahun selama 7 tahun yaitu 4,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejumlah 26 ha dan yang terkecil tidak terjadi mutasi lahan.

Ketiga, persoalan Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau di Kota Blitar sendiri tersebar di seluruh wilayah Kota Blitar. Ruang terbuka hijau terdiri atas taman kota, dan median jalan, lapangan, makam, tempat rekreasi, sawah perkotaan, dan sebagainya. sebagian besar wilayah Kota Blitar berupa kawasan pemukiman (36,96%) dan pertanian (37,94%). Hingga tahun 2015 prosentase Ruang Terbuka Hijau adalah 20,12% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khususnya untuk RTH Publik, pada tahun 2015 mencapai 694.4601 (10,34%) dan RTH Privat mencapai 1.309.5040 (9,78%). Diharapkan pada tahun 2030 akan dapat mencapai 30% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang RTRW.

Keempat, matinya sumber mata air yang ada di Kota Blitar sebanyak 27 buah¹⁴. Tetapi belakangan ini sudah ada 2 buah yang mati di Kecamatan Sukorejo yakni Kelurahan Pakunden. Penyebabnya cukup beragam, selain karena faktor alam, beberapa diantaranya juga disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Disamping sumber mata air tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah dan pohon-pohon disekitar mata air ditebang dan tidak diganti. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara menanam kembali pohon yang telah ditebang agar mata air di sekitar pohon tetap terjaga.

Kelima, pencemaran air sungai. Disini pendidikan lingkungan dan sosialisasi sangat penting karena masih rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat akan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga berdampak menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran air limbah tahu di Sumber Wayuh dan

Sumber Jaran Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukerejo karena air limbah tahu langsung dibuang ke sungai. Sedangkan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) yang tersedia belum optimal penggunaannya berdasarkan hasil pengujian, kualitas air sungai Sumber Wayuh dan Sumber Jaran telah terjadi peningkatan kualitas dari semula IV menjadi kelas III kriteria baku mutu air sesuai PP nomor 82 tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh kandungan COD, BOD, phosphat total dan sulfida telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. *Keenam*, persoalan sampah. Masalah sampah ini merupakan masalah yang signifikan di Kota Blitar karena perlu kesadaran dari semua masyarakat. Timbunan sampah ini setiap penduduk Kota Blitar terus bertambah seiring bertambahnya penduduk Kota Blitar, kemudian sulitnya mencari TPA, karena selama ini TPA berada di wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini yang menjadi persoalan yang segera di kerjakan. Sisi lain ada solusi yang ditawarkan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan di Kota Blitar yakni mengupayakan untuk lokasi pengelolaan sampah menjadi kompos di setiap kecamatan yakni melalui pengolahan sampah tuntas (IPESATU) di Kecamatan Sananwetan.

b. Kebutuhan Non-Materi

Kebutuhan non-materi berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai *part of the process* dalam penyampaian pendapat. Keterlibatan masyarakat akan mampu mempengaruhi kualitas keputusan para pengambil kebijakan. Karena masyarakat merupakan pakar lokal dalam artian lebih memahami kondisi dan lingkungan sekitar. Kota Blitar sendiri mengartikan instrument dari undang-undang tersebut dengan menerbitkan KLHS. KLHS di Kota Blitar sendiri sudah disusun sejak Tahun 2011 namun baru di implementasikan tahun 2015. Kendala dalam implementasi KLHS didapat lantaran masih belum terdapat instrumen yang menjadi patokan dalam

¹⁴ RPJM Kota Blitar Tahun 2016

penyusunannya hingga turun edaran bersama Menteri dalam Negeri RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Selain itu perlu pengkajian yang utuh menyeluruh di lingkungan Kota Blitar, kendala lain adalah setelah tersusun instrumen KLHS harus diimplementasikan ke dalam RTRW dan RPJMD Kota Blitar, selain itu turunan dari UU 32 Tahun 2009 diwujudkan melalui adanya Peraturan Walikota Blitar (Perwali) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Dari Perwali tersebut juga mengakomodasi Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (KMPLH) yang kemudian dikenal dengan Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam pengawasan lingkungan, terdapat 21 KPL tersebar di 21 kelurahan se-Kota Blitar dengan agenda rutin berupa pertemuan dengan jajaran Badan Lingkungan Hidup, agenda pertemuan dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali agenda pembahasan meliputi update data, evaluasi peran KPL dalam Musrenbang di Kelurahan, infomasi pembuatan biopori dan informasi bank sampah. Pertemuan rutin antara KPL dan pemerintah terkait menjadi angin segar bagi pembangunan lingkungan di Kota Blitar. Sehingga dengan lahirnya Perwali tersebut diharapkan mampu menjadi acuan bagi semua elemen terkait terutama bagi masyarakat Kota Blitar, sebagai aktor penting keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tercapai lingkungan yang sehat dan kondusif. Pengejawantahan lain dari Perwali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang dianggap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat kepada lingkungan adalah

melalui Program Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di lingkungan kelurahan mereka masing-masing.

2. Pemeliharaan Integritas Ekologi

Indikator kedua dari konsep *sustainable development* yakni pemeliharaan lingkungan yang memiliki 2 (dua) indikator konservasi dan mengurangi konsumsi.

a. Konservasi

Indikator ini menjelaskan bahwa konservasi memiliki maksud perlindungan lingkungan, baik lingkungan sumber daya maupun ruang yang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumberdaya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Persoalan lingkungan di Kota Blitar ada beberapa persoalan, persoalan yang paling umum di setiap kota adalah persoalan limbah, baik limbah rumah tangga, limbah industri, limbah hotel, limbah rumah sakit ataupun limbah lainnya.

Di Kota Blitar hanya memiliki satu sungai besar yang mengalir dari sisi utara sampai selatan Kota Blitar yaitu sungai Lahar yang hulunya ada di Kabupaten Blitar. Secara umum kondisi air badan air Kota Blitar masih relatif baik¹⁵. Pemantauan kualitas air badan air rutin dilakukan sejak tahun 2012 pada badan air yang menjadi titik pembuangan dari air limbah industri tahu yaitu sungai sumber wayuh dan sungai sumber jaran serta pertemuan kedua sungai tersebut yaitu kali tempur.

Persoalan lain yang ada di Kota Blitar adalah pengelolaan RTH. Sebagai wilayah perkotaan, ketersediaan lahan Kota Blitar relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini terkait penggunaan lahan.

Tabel 2

¹⁵ Berdasarkan RPJMD 2016 Kota Blitar.

Penggunaan Lahan Di Kota Blitar

| NO | Uraian Kawasan Lindung | Penggunaan Lahan Tahun 2015 | % |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1. | Kawasan Resapan Air | 148 | 4,54% |
| 2. | Kawasan Perlindungan Setempat | 58 | 1,78% |
| 3. | Kawasan Ruang Terbuka Hijau | 655 | 20,12 % |

Sumber : Dokumen Bapedda Kota Blitar, 2017

Dari tabel di atas, sebagian besar wilayah Kota Blitar berupa kawasan permukiman (36,96%) dan pertanian (37,94%). Hingga Tahun 2015 prosentase Ruang Terbuka Hijau adalah 20,12% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khusus untuk RTH publik, pada Tahun 2015 mencapai 10,34%. Kemudian Pemkot Blitar pada Tahun 2030 akan dapat mencapai 30% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang RTRW. Hal ini seperti yang dikatakan Kasubdit Pengendalian dampak lingkungan¹⁶, yakni:

“Ketersediaan ruang terbuka hijau tahun 2016 di Kota Blitar kurang 20% karena di Kota Blitar masih mencapai 10,40% dari luas wilayah Kota Blitar. Pada Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2002 tentang Pengelolaan hutan kota dijelaskan sebuah kota harus memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan RTH seperti Taman Pecut akan selesai pada 2017”

Terdapat beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah : (1) Intensitas

¹⁶Wawancara dengan Denny Eko Prisanto selaku Kasubdit Pengendalian Dampak Lingkungan. Pada tanggal 16 November 2016.

kegiatan pembangunan yang semakin meningkat; (2) Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam; (3.) Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar; (4.) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah; (5.) Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan; (6.) Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal¹⁷

Tantangan bagi semua aktor yang terlibat di Kota Blitar yaitu Pemerintah, Satuan Kerja Kepala Daerah, Swasta dan Masyarakat sesuai dengan isu strategis di KLHS, diantaranya: (1). Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik (2.) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air. Tantangan inilah yang menjadi tugas bagi semua aktor agar bisa bekerjasama untuk menuntaskan isu strategis. Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Blitar. *Pertama*, Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Kedua*, Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya. *Ketiga*, Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait. *Keempat*, Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam

¹⁷Renstra Kota Blitar 2016-2021



pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

b. Mengurangi Konsumsi

Di Kota Blitar dalam melakukan pola konsumsi untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan seperti:

a. Perencanaan dan perancangan kota (*Green Planning and Design*), yang bertujuan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

b. Pembangunan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH 30%.

c. Komunitas hijau (*Green Community*) yaitu pengembangan jaringan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat.

d. Pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (*Green Waste*) yaitu dengan menerapkan pengelolaan limbah dan sampah hingga menghasilkan *zero waste*.

e. Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan (*Green Transportation*) yaitu dengan mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan, serta berjalan kaki dan bersepeda dalam jarak pendek.

f. Peningkatan kualitas air (*Green Water*) dengan menerapkan konsep *eco-drainase* dan *zero runoff*.

g. *Green Energy*, yaitu pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.

h. *Green Building*, yaitu penerapan bangunan hijau yang hemat energi. Dalam pelaksanaannya Kota Blitar sendiri belum mampu menerapkan atribut Kota Hijau secara keseluruhan.

Program dan kegiatan yang mendukung Kota Hijau di Kota Blitar diarahkan pada pelaksanaan *green planning and design, green water, green waste, green community, green open space*. Program dan kegiatan itu tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2011-2015. Beberapa cara yang telah dilakukan dengan baik di Kota Blitar diantara yaitu pengurangan pemanasan global dan pengelolaan sampah.

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global. Kemudian Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah: mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial terdapat dua pembasan, diantaranya:

a. Keadilan Masa Kini

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan yang pertama adalah keadilan kini menunjukkan perlunya keadilan dan

kesetaraan akses dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Konteks pembangunan lingkungan di daerah perkotaan salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 152 juta jiwa (65%)¹⁸. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan seperti banjir, kemacetan, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau. Kemudian faktor lain yang memperberat persoalan lingkungan adalah fenomena perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak signifikan terhadap pembangunan perkotaan. Misal dampak yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, penghidupan penduduk, dan penyelamatan asset yang ada. Dampak semakin parah dirasakan oleh kaum miskin. Perubahan iklim secara langsung menimbulkan cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan amat sangat di musim kemarau sekaligus di musim penghujan yang curah hujan sangat tinggi.

Kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun menjadi alasan terbetuknya Program Kampung Iklim. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, kapasitas aparatur pemerintah relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan perkotaan yang harus dihadapi, antara lain peraturan, pendanaan,

¹⁸ Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPN) 2010 – 2025, (Jakarta: Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, 2010), p.1.

organisasi, sumber daya manusia, dan keterpaduan perencanaan¹⁹.

Bencana terkait dampak perubahan iklim juga sudah mulai dirasakan masyarakat Kota Blitar. Berdasarkan Analisis Resiko Perubahan Iklim Kota Blitar, terdapat 5 bahaya yang merupakan dampak dari perubahan iklim Kota Blitar yaitu kekeringan, wabah penyakit yang terkait perubahan iklim. (Diare, ISPA, DBD, Chikungunya, Dipteri), genangan, angin ribut, tanah longsor, dan gagal panen. Pada akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 terjadi genangan air hujan yang frekuensi dan intensitasnya meningkat sehingga cukup aktivitas warga. Gejala keterbatasan air tanah ditunjukkan dengan semakin dalamnya warga kota harus mengebor sumur untuk memperoleh air (hingga 16 meter)..

Di Kota Blitar dalam merespon perubahan iklim atau dalam pembangunan lingkungan selain dengan menerapkan Program Kampung Iklim yang secara kebijakan bersifat *Top Down*, ada cara lain yakni dengan menerapkan pengelolaan sampah menjadi kompos di setiap kecamatan atau pengolahan sampah tuntas (IPESATU) yang terletak di Kecamatan Sananwetan. TPA yang jauh berada di Kabupaten Blitar ini menjadi alasan bahwasanya sampah belum ditangani secara maksimal. Maka dari itu perlunya kesediaan lahan untuk tempat pengolahan sampah agar tidak berakibat fatal.

Persoalan lain dalam hal keadilan masa kini yakni pemerataan pembangunan. Konteks ini di Kota Blitar dalam hal pembangunan lingkungan, maka perencanaan wilayah perlu diperbaiki agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Sebagai wilayah perkotaan yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil (32,58 km²), lahan yang ada di Kota Blitar sebagian besar adalah lahan non pertanian. Dengan luas baku sawah Kota Blitar ± 1.000 ha,

¹⁹ *Op.Cit.* hlm.182.

maka sebagian besar lahan yang dimiliki penduduk adalah lahan untuk permukiman dan perdagangan barang/jasa²⁰. Hal ini juga ditunjukkan oleh sebagian besar pekerjaan penduduk Kota Blitar adalah di luar sektor pertanian. Jika ada yang memiliki lahan pertanian, luasnya relatif kecil dan ada juga petani Kota Blitar yang memiliki lahan di luar wilayah Kota Blitar (Kabupaten Blitar dan sekitarnya).

Pengembangan wilayah dalam bentuk penambahan luasan wilayah sudah tidak memungkinkan. Namun demikian, potensi pengembangan wilayah bagi Kota Blitar dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun industri pengolahan, akan menimbulkan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lainnya²¹. Karena keterbatasan lahan, Kota Blitar tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Penggerak ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan wisata dan kawasan perdagangan barang dan jasa. Potensi pengembangan wisata Kota Blitar relatif besar dengan keberadaan Makam Bung Karno sebagai *icon* wisata Kota Blitar. Setiap tahun banyak wisatawan yang mengunjungi Kota Blitar terutama untuk mengunjungi makam Bung Karno.

b. Keadilan Masa Depan

²⁰ RPJMD Kota Blitar 2016.

²¹ *Ibid*.

Keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antara generasi dengan menghargai devertitas budaya dan kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan atas sumberdaya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan lingkungan di Kota Blitar salah satu misinya²² adalah memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Implementasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu 2011 - 2015 merujuk pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pengganti UU 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang – Undang Lingkungan yang baru tersebut mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Keadilan masa depan akan tercapai ketika *stakeholder* saling bekerjasama yaitu, pemerintah Kota Blitar selaku

²² Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berdasarkan kepada makna visi kota yang telah ditetapkan. Misi Kota Blitar periode 2011-2015, diantaranya mewujudkan masyarakat yang berwawacsan kebangsaan dan berketuhanan yang maha esa, meingkatkan kualitas pendidikan dan kementerian pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata, memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, dan terakhir memantapkan pelaksanaan pembangunna berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah.

pembuat kebijakan, pihak swasta, dan terlebih adalah keikutsertaan masyarakat. masyarakat pemerhati lingkungan, instansi penangananan lingkungan dan juga CSR. Kesadaran dalam pengelolaan dan penggunaan secara bijak menjadi penting bagi setiap masyarakat. Lingkungan yang akan dinikmati anak cucu di masa depan. Maka dari itu pendidikan lingkungan diberikan di bangku sekolah di setiap Kota Blitar.

4. Kesempatan untuk Menentukan Nasib Sendiri

Indikator selanjutnya dalam konsep *sustainable development* adalah kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*). Indikator ini memiliki dua prinsip, diantaranya:

a. Masyarakat Mandiri

Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas dasar hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk alokasi sumberdaya alam. Pembangunan lingkungan di Kota Blitar. Peran masyarakat terwadaih dengan adanya Perwali No 21 Tahun 2015 tentang Peran Serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran masyarakat Kota Blitar dalam pembangunan lingkungan selain kesadaran individu setiap masyarakat, sisi lain yang menjadi landasan dalam keikutsertaan masyarakat menjaga lingkungan yakni melalui RPPLH²³. Dalam RPPLH masyarakat menyampaikan dan memperoleh informasi mengenai status lingkungan hidup dan transportasi perizinan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program Kampung Iklim masyarakat di Kota Blitar pun dilibatkan atau ikut berpartisipasi aktif dalam

melakukan langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi, yang memperhatikan kearifan lokal dan mencakup serangkain kegiatan perencanaan sosialisasi, fasilitas, pengawasan, evaluasi dan penilain.

Kota Blitar secara kualitas udara bagus, seperti disinggung pada pembahasan di atas, tetapi untuk pencemaran polusi udara akibat dari aktivitas indsutri rumah tangga tidak dapat dihindari, walaupun masih tergolong kecil, seperti contohnya di Kelurahan Pekunden yang terletak di Kecamatan Sukerejo, contoh memliki berbagai macam masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas indutri rumah tangga tahu dan tempe, dan aktivtas peternakan. Santasi yang tidak baik kemudian menabmbah pencemaran lingkungan. Dengan dilatarbelakangi permasalahan lingkungan tersebut maka terpilihlah Kelurahan Kapunden menjadi salah satu daerah percontohan untuk proklam untuk tahun 2011 ini. Di dalam rencana kerja proklam ini ada beberapa langkah yang bertujuan mewujudkan Kelurahan Pakunden yang ramah lingkungan. Diawali dengan pembangunan talud untuk perlindungan Mata Air Sumberwayuh dan Sumberjaran, kemudian dilakukan pula pembangunan tempat pengolahan limbah tahu akhir di aliran Sumberwayuh, program bakti sosial pembersihan sungai, sampai dengan penanaman bibit pohon rambutan, bibit suren, dan bibit buah kelengkeng.

Selanjutnya untuk memperbaiki sistem sanitasi, masyarakat diberikan bantuan berupa pembagian gerobak di masing-masing RW, tong sampah, pembangunan tempat pengolahan akhir tahu, perlindungan mata air, dan penghijauan kota. Diharapkan kegiatan proklam ini dapat berjalan optimal, sesuai dengan rencana dan target, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daerah yang berhasil menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, kegiatan ini dapat dikatakan

²³ Di akan setahun sekali pada Musrebang RPJMD.

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan Kota Blitar yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan di dalam kegiatan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Kota Blitar yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah kota memiliki beberapa tantangan dan target yang hendaknya dapat diwujudkan, yaitu peningkatan pelayanan sanitasi, pemantapan sistem lingkungan yang aman, lestari, dengan mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang saat ini telah tertuang di dalam Raperda RTRW Kota Blitar. Selain melibatkan masyarakat setempat, tidak menutup kemungkinan pemerintah kota untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka mewujudkan Kota Blitar yang lestari pariwisata.

b. Partisipasi Demokrasi

Prinsip partisipasi demokrasi memiliki artian adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi demokrasi diharapkan mampu menuai manfaat dari keputusan dan peran yang sudah masyarakat berikan. Pembangunan di Kota Blitar yang melibatkan masyarakat mempunyai potensi yang sangat besar karena pada prinsipnya Kota Blitar menerapkan pembangunan yang partisipatif, dimana pemerintah dalam program dan kebijakan mengutamakan partisipasi masyarakat dan memberikan porsi yang lebih dengan tetap tidak mengesampingkan tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan kemandirian dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungan secara mandiri dengan menciptakan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan serta mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan

demikian mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Blitar.

Secara legal formalnya pemerintah Kota Blitar membuat rumusan peran masyarakat yang dapat berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan. Dalam penyusunan kebijakan penataan ruang berdasarkan RTRW Kota Blitar Tahun 2011-2030 terbagi menjadi tiga aspek meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Agar terwujud partisipasi yang ideal maka, diperlukan sarana yang mampu mewedahi seluruh partisipasi dan apresiasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tata ruang. Dimensi dari peran masyarakat kemudian diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RW dilaksanakan setiap minggu ke II bulan januari, Kelurahan diadakan pada minggu III-IV bulan januari, Kecamatan diadakan minggu ke II bulan februari, dan Musrenbang ditingkat Kota dimulai dengan forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), kemudian berlanjut ke Musrenbang RKPD Kota Blitar yang melibatkan seluruh SKPD, tokoh masyarakat, LSM dan perguruan tinggi yang dilaksanakan pada minggu III bulan maret. Pelaksanaan Musrenbang selama ini mendapatkan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Blitar. Monev rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, mencakup aspek kebijakan (kesesuaian dokumen perencanaan) maupun aspek hasil realisasi pelaksanaan pembangunan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari peneliti ini adalah sebagai berikut; *perama* Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia baik materi maupun nonmateri

berdasarkan konsep *sustainable development* oleh Pemerintah Kota Blitar belum sepenuhnya berjalan optimal, terdapat tren positif dalam penyelesaian setiap permasalahan lingkungan yang secara langsung berimplikasi pada permasalahan ekonomi, dan kependudukan. Pendukung terjadinya tren positif ditunjukkan oleh pemerintah Kota Blitar, dikarenakan seluruh aspek terkait termasuk masyarakat mampu berperan aktif selain itu terdapat legal formal yang melandasi setiap keputusan yang diambil. Ini artinya pemenuhan kebutuhan manusia di Kota Blitar sudah mampu mengakomodasi seluruh aspek yang ada.

Kedua, Pemeliharaan Lingkungan Secara umum Pemerintah Kota Blitar sudah sadar akan pentingnya perlindungan lingkungan. Perwujudan dari kepedulian yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui penyusunan KLHS, selain daripada itu Pemerintah Kota Blitar memahami bahwa tidak hanya regulasi saja yang mampu mengatasi permasalahan lingkungan perlu adanya tindakan lain yang kemudian diterjemahkan melalui pembangunan RTH, walaupun ketersediaan RTH di Kota Blitar masih belum terpenuhi seluas 30%, tentunya semua permasalahan dalam usaha pemeliharaan lingkungan membutuhkan solusi jangka panjang oleh karena itu diperlukan perubahan pola konsumsi beberapa cara yang sudah diterapkan Kota Blitar dalam perubahan pola konsumsi adalah merubah ketergantungan masyarakat pada pola pengolahan emisi gas rumah kaca. Yang perlu digaris bawahi adalah pemrumusan regulasi dan kebijakan oleh pemerintah dan pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat adalah untuk kepentingan bersama menuju Kota Blitar yang berkelanjutan.

Ketiga Keadilan Sosial. Kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan untuk generasi mendatang dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dalam mewujudkan keadilan sosial Pemerintah Kota Blitar mampu menerjemahkan dengan baik melalui visi dan misi solusi yang di tawarkan oleh pemerintah salah satunya melalui mitigasi bencana terhadap perubahan iklim yang ditakutkan dapat berdampak kepada perubahan lingkungan. Masih terdapat 6 (enam) kelurahan yang rawan dampak perubahan iklim, faktor utama dari kerawanan ini adalah kepadatan penduduk sehingga perlu adanya pemerataan pembangunan. Secara garis besar keadilan sosial tercapai apabila terdapat kerjasama antara *stakeholder* dan masyarakat.

Keempat, Kesempatan Menentukan Nasib Sendiri. Dalam indikator ini kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam mendapatkan akses dan kemudahan dilingkungan Kota Blitar. Akses bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut serta membangun Kota Blitar yang lebih baik ditunjukkan oleh pemerintah dengan dilibatkan peran masyarakat melalui KPL yang berada dalam naungan BLH, selain itu pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Perwali Nomor 21 Tahun 2015 sebagai instrument pendukung peran masyarakat dalam membangun lingkungan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Sudharto. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press
- James A. Black dan Bean J. Champion. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*, Bandung, CV. Alfabeta, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013

Anthoni J.C dan James C. Snyder. *Perencanaan Kota*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1989

Sudharto P. Hadi. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Jogja. Gajahmada Unversity Press

Fauzi A. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia 2004

Fauzi A. *Rethinking Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam. Artikel dalam Buku Orange Book ; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global*. Bogor. IPB Press. 2009.

Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gajah Mada Press. : Yogyakarta

Gustomy, Mohtar. 2014. *Bahan Bacaan : Teori Pembangunan. Prodi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya. 2014.

Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Dokumen

Buku Rencana Kerja 2011-2020 Bappeda Kota Blitar

Buku Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Buku Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Buku Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

PPID 2015-2025 Kota Blitar

Rencana Tata Ruang Wilaya Kota Blitar Tahun 2011-2030

Buku Rencana Strategis 2011-2020 Kota Blitar

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Blitar 2015 Rencana Aksi Kota Hijau Kota Blitar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran

Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penelitian

M. Fani Cahyandito. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekologi, Ekonomi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*. 2006.

Selvia Rosy Erdha Okta Reza. *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus pada badan Lingkungan Hidup Kota Malang)*. 2014. Universitas Brawijaya.

Susi Lastrika Sinaga. *Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang dalam Pembangunan Berkelanjutan (studi pada Bappeda Kota Malang)*. 2012. Malang. Universitas Brawijaya

Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun. *Evaluasi Dampak Pembangunan Kawasan Bumiaji Berbasis Agroindustri Menuju*

Terwujudnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup (suatu Kajian Sustainable Development

berwawasan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota

Batu). 2012. Depok. Universitas Indonesia.

M Rozikin. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di*

Kota Batu, 2012. Malang: Wartaposonline.com/kota-blitar-raih-adipura-dua-belas-kali-berturut-turut

Wawancara

Wawancara dengan Christina Ratnawati, Kepala Divisi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultural, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar, 19 November 2016 pukul 14.15 di Lobi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar.

Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup. Bappeda Kota Blitar, Pada Tanggal 17 November 2016 pukul 10.30 di Ruang Tamu Bappeda Kota Blitar

Wawancara dengan Bambang selaku Staff Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, Olahraga dan Parawisata pada Tanggal 24 November 2016 pukul 11.45 di Ruang Bapak Bambang

Wawancara dengan Ir Herlyn Krisnawati selaku Kepala Prasarana RTRW Bappeda Kota Blitar pada Tanggal 22 November 2016 pukul 10.45 di Ruang Lobi Bappeda Kota Blitar.

Wawancara dengan Imam Sholikin selaku Kasi Pemanfaatan Ruang Kota. Pada Tanggal 11 November 2016 pukul 12.00 di Ruang Bagian Umum Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar

Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub-Bidang Lingkungan Hidup. Pada Tanggal 17 November 2016 pukul 09.35 di Ruang Tamu Bappeda Kota Blitar

Website

www.blh.blitarkota.go.id

www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8105

<http://www.blitarkota.go.id/>

<https://www.timesindonesia.co.id/baca/108883/20151119/142302/kelurahan-ini-masuk-daerah-termiskin-di-kota-blitar/>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengambil fokus Pembangunan Lingkungan dalam Perspektif *Sustainable Development* Studi Kasus di Kota Blitar. Menurut Budimanta, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah cara yang dilakukan oleh *stakeholder* secara sistematis dan terencana dengan tujuan agar generasi sekarang kebutuhannya mampu terpenuhi namun tidak mengurangi kebutuhan generasi mendatang¹. Bermakna bahwa mengenai peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan menjadikan lingkungan sebagai prespektif dalam pembangunan harus menjadi prioritas. Pembangunan yang memakai paradigma pembangunan berkelanjutan adalah kota yang nyaman bagi masyarakat didalamnya. Mampu menjadi kota yang ramah pada masyarakat dengan terjangkau akses ekonomi dan social, budaya transparansi bagi setiap warga untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan intregrasi sosial warga dan bersahabat dengan lingkungan.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup². Paradigma ini lahir karena para *stakeholder* menganggap keberhasilan sebuah perkotaan dapat dilihat dengan tercapainya moderenitas dan kemajuan teknologi yang dapat mendukung aktivitas manusia.

¹Soegijarno, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, URDI, Jakarta, 2005, hlm.377.

²B Tjokroamijojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1994, hlm.67.

Dengan demikian perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memperkirakan besar-kecilnya dampak yang akan terjadi akibat pelaksanaan rencana yang kurang matang, maka dirasa perlu adanya instrumen pengelolaan lingkungan hidup kedalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Sebagai gambaran perencanaan tata ruang di Indonesia saat ini masih terdapat beberapa kelemahan yang kurang mendukung tercapainya proses pembangunan yang ideal, antara lain³: *pertama*, perencanaan seringkali terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang lebih sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian atau hanya sebagai pemecahan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek; *kedua*, rencana tata ruang tidak didukung oleh pengelola perkotaan yang handal, maupun mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Ketiga, perencanaan tata ruang saat ini masih ditekankan pada aspek fisik dan visual dan belum berkaitan dengan perencanaan komunitas (social dan budaya) dan perencanaan sumberdaya (*resource planning*); *keempat*, belum adanya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan kawasan dan wilayah dan diperparah dengan adanya arogansi sektoral dan ego sentrisme; *kelima*, masih kurangnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan sebagainya. Seharusnya yang terjadi adalah pembangunan yang berkesinambungan antara aspek buatan manusia dan aspek alami karena keduanya saling mendukung dan saling bergantung⁴.

Semisal pembangunan diperkotaan dimana pembangunan harus berkesinambungan dengan aspek-aspek lain dan tidak hanya berorientasi pada

³ Budihardjo, Eko. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Andi. Yogyakarta. 1999. Hlm 37

⁴ *Ibid.* hlm.37

pembangunan yang hanya melihat berdasarkan indikator fisik. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.⁵

Pasca berakhirnya Pembangunan Semesta Berencana maka lahirlah program Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Sejak Repelita I sampai Repelita VI sesuai tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), titik berat diberikan pada pembangunan ekonomi. Strategi kebijaksanaan pembangunan bertumpu kepada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan pada masa Orde-Baru ini cenderung bersifat sentralistik dan *Top-Down* kewenangan pembuatan perencanaan didominasi oleh pemerintah pusat dan terkesan eksklusif pemerintah daerah hanya menjadi subjek pembangunan tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam pengkajian permasalahan pembangunan di daerahnya. Dampak ikutan dari sistem sentralisasi ini adalah kewenangan daerah semakin mengecil juga dapat menurunkan kreativitas dan inovasi dalam memajukan daerah dan masyarakatnya.

Kini, bergerak sebagai *think-thank* adalah lembaga yang bernama Bappenas berlandaskan kepada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) lahir sebagai pengganti dari GBHN

⁵ Agus Suryono, *Dimensi Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Pers.Malang.2010.hlm 6

menggantikan sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN dalam menjaga pembangunan nasional yang menganut paradigma visioner.

Kunci pembangunan Era Reformasi adalah adanya desentralisasi, yakni pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Semangat desentralisasi terwujud lantaran pembangunan yang tidak merata dan terkesan sentralistik pada masa Orde-Baru, harapan untuk pembangunan nasional

yang adil dan merata diejawantahkan ke dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang diimplementasikan dalam sistem administrasi

publik baik tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

tanpa tidak terkecuali. Kurun waktu 2001-2004 implementasi Undang-undang

otonomi daerah tersebut dirasa perlu adanya evaluasi dan kemudian lahir UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam konteks pembangunan lebih khusus pembangunan lingkungan di

Kota Blitar menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya, *pertama* alih fungsi

lahan. Pada kurun waktu 2004 sampai dengan 2010 telah terjadi alih fungsi lahan.

Menurut Dinas terkait yakni Tanaman dan Holtikultural Kota Blitar pada tahun

2010 adalah 4,28% di banding pada tahun 2004. Jumlah mutasi lahan pertanian

terbanyak terjadi pada tahun 2006 sejumlah 26Ha dan terkecil terjadi pada tahun

2009 tidak ada mutasi lahan⁶. Setelah tahun 2010 terjadi alih fungsi lahan setiap

tahunnya. Berdasarkan wawancara Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultural:

⁶Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH).hlm.18.

“Alih fungsi lahan setiap tahun menurun dari lima sampai sepuluh hektar, alih fungsi tersebut faktor utamanya yang jelas perumahan, fasilitas umum, dan gudang. Karena arah yang jelas adalah barang dan jasa”⁷.

Lebih lanjut lagi, dibawah ini tabel perubahan luas lahan persawahan, dimana terdapat alih fungsi lahan.

Tabel 1.1

Perubahan Luas Lahan Persawahan dari Tahun 2009-2015

| No | Kecamatan | Baku Sawah (Dalam Hektar Area (Ha)) | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Sananan Wetan | 441 | 438 | 438 | 434 | 434 | 429 | 427 |
| 2. | Kepanjenkidul | 347 | 346 | 346 | 349 | 348 | 347 | 345 |
| 3. | Sukorejo | 365 | 365 | 350 | 341 | 337 | 327 | 325 |
| Kota Blitar | | Jumlah | | | | | | |
| | | 1,153 | 1,149 | 1,134 | 1,124 | 1,119 | 1,103 | 1,097 |

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan SLHD 2017.

Tabel di atas menjadi pembandingan jumlah alih fungsi lahan persawahan di Kota Blitar rentang tahun 2009 hingga 2015, dari tiga kecamatan yang berada di Kota Blitar. Di Kecamatan Sanan Wetan jumlah alih fungsi lahan tertinggi berada pada tahun 2009 sejumlah 441 Ha dan terendah tahun 2015 berjumlah 427 Ha, sedangkan untuk Kecamatan Kepanjenkidul tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 249 Ha dan terendah pada tahun 2015 berjumlah 345 Ha dan untuk Kecamatan Sukorejo jumlah alih fungsi lahan pertanian tertinggi dialami pada rentan tahun

⁷Wawancara dengan Christina Ratnawati Selaku Kasi Produksi Tanaman pangan dan Holtikultural. Pada Tanggal 19 November 2016



2009 dan 2010 sebanyak 365 Ha dan mengalami penurunan terendah pada tahun 2015 sejumlah 325 Ha. Sedangkan untuk keseluruhan penurunan jumlah lahan di Kota Blitar tahun 2009 hingga 2015 terendah berada pada tahun 2009 seluas 1,153 Ha dan setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah alih fungsi lahan persawahan hingga pada tahun 2015 alih fungsi lahan tersisa 1,097 Ha. Agar kondisi Kota Blitar tetap mampu mendukung keberlanjutan berbagai sektor yang ada, pemerintah daerah perlu mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut dengan tetap menjaga daya tampung serta daya dukung wilayah agar kota tetap *sustainable* (berkelanjutan).

Kedua, pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Blitar dilihat dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif dengan diperolehnya Anugerah Adipura⁸ selama dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2004 hingga 2016⁹. Namun diperolehnya Anugerah Adipura yang notabene penghargaan dalam bidang lingkungan masih belum diimbangi dengan salah satu unsur pendukung dimana seharusnya terdapat Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari seluruh luas wilayah dengan pembagian 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat¹⁰. Sementara itu di Kota Blitar RTH pada tahun 2015 yang terpenuhi baru mencapai adalah 20,12% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khusus untuk RTH publik, pada Tahun

⁸ Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 ada 54 daerah yang mendapatkan Anugerah Adipura, termasuk Kota Blitar.

⁹ [Wartaposonline.com/kota-blitar-raih-adipura-dua-belas-kali-berturut-turut/](http://wartaposonline.com/kota-blitar-raih-adipura-dua-belas-kali-berturut-turut/). Diakses pada 29 September 2016

¹⁰ Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat (1), RTH Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan di kelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, diantaranya taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Kemudian RTH Privat antara lain kebun/halaman, rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Di ayat (2) proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain.

2015 mencapai 10,34%. Seperti hasil wawancara dengan Kasubdit Pengendalian

Dampak Lingkungan Kota Blitar¹¹:

“Ketersediaan ruang terbuka hijau tahun 2016 di Kota Blitar kurang 20% karena di Kota Blitar masih mencapai 10,40% dari luas wilayah Kota Blitar. Pada Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2002 tentang Pengelolaan hutan kota dijelaskan sebuah kota harus memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan RTH seperti Taman Pecut akan selesai pada 2017”

Dari wawancara tersebut diartikan bahwa belum optimal pembangunan RTH di Kota Blitar yang notabene mendapatkan berkali-kali mendapatkan penghargaan tersebut atau bisa dikatakan Pekerjaan Rumah yang segera dikerjakan, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, masih terdapat isu-isu lingkungan yang belum terselesaikan oleh Pemerintahan Kota Blitar, seperti yang tercantum pada KLHS Kota Blitar Tahun 2014¹², diantaranya *pertama* luasan lahan terbangun semakin meningkat mengakibatkan berkurangnya luasan lahan pertanian, *kedua* adanya pengembangan perumahan/permukiman yang menyebabkan konversi lahan, terutama dari lahan pertanian subur dikeringkan menjadi lahan perumahan, *ketiga* hasil pembuangan limbah dan sampah yang berasal dari limbah rumah tangga, kantor, hotel, rumah makan, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit mengakibatkan pencemaran pada kualitas air, *keempat* meningkatnya limpasan air karena peningkatan lahan terbangun yang menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah, *kelima* timbulnya polusi udara dan suara dikarenakan adanya perkembangan pembangunan.

¹¹Wawancara dengan Denny Eko Prisanto selaku Kasubdit Pengendalian Dampak Lingkungan. Pada tanggal 16 November 2016.

¹² Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dan Peraturan Zonatasi Kota Blitar Tahun 2014.

Peran KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sangat penting, dengan cara mengintegrasikan konsep KLHS dalam proses penyusunan KRP dirasa dapat memberikan peluang peningkatan kualitas kebijakan publik sehingga lebih bisa menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar. Hal ini dikarenakan, dalam implementasi konsep KLHS nantinya dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, terutama dalam menjalankan pembangunan jangka menengah dan panjang. Periode pembangunan menengah dan panjang dirasa sangat sejalan dengan konsep KLHS, karena memiliki jenjang waktu yang cukup ideal yaitu selama lima tahun bersifat saling berkaitan dan sekuensial. Penerapan KLHS selain berupaya mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan pembangunan berkelanjutan diantaranya aspek ekonomi, social dan lingkungan juga diharapkan mampu merangsang peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas diantara para pengambil kebijakan dan *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa alasan mengapa peneliti tertarik mengambil tema tersebut di Kota Blitar. *Pertama* melihat dari permasalahan pembangunan lingkungan yang ada di Kota Blitar seperti permasalahan 3 (tiga) di atas. *Kedua* Kota Blitar adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terkecil kedua¹³, meskipun tergolong kota kecil pembangunan tidak kalah bersaing dengan kota-kota yang lainnya. Dalam rencana struktur perwilayahan ditingkat regional Jawa Timur, Kota Blitar telah menjadi salah satu Pusat Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Blitar Raya dengan wilayah Kabupaten Blitar sebagai wilayah pengaruhnya. Posisi ini menjadi potensi pembangunan kota terutama jika dilihat dari fungsi kota

¹³www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8105. Diakses pada tanggal 29 September 2016.

yang akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan tersier, yaitu perdagangan dan jasa, niaga, pendidikan, pemerintahan, *home industry*, dan akomodasi pariwisata.

Seperti karakteristik pariwisata di Kota Blitar dengan objek wisata yang bersifat kebangsaan. Salah satu objek wisata yang ada di Kota Blitar adalah makam proklamator RI Ir. Soekarno. Keberadaan makam Bung Karno dan situs wisata kebangsaan lainnya menjadi faktor pendukung bagi perkembangan perekonomian di Kota Blitar yang juga berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan jasa, yang kemudian pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa membawa konsekuensi logis berupa pertambahan lahan terbangun.

Ketiga, adalah pengambilan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi di daerah Kota Batu dengan fokus pembangunan berkelanjutan berbasis pada agroindustri, dan pembangunan berkelanjutan di Malang berbasis pada agropolitan. Selanjutnya dengan mengambil penelitian di Kota Blitar yang secara geografis, sosial, ekonomi dan budaya memiliki perberbedaan dengan kota lain.

Dengan demikian, pembangunan lingkungan di Kota Blitar menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mempunyai pertanyaan yang diajukan, yakni bagaimana pembangunan lingkungan di Kota Blitar dalam perspektif *Sustainable Development*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui bagaimana pembangunan lingkungan di Kota Blitar dalam persepektif *sustainable development*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditulis di atas, maka adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada Birokrasi, *Civil Society* dan Politik Lingkungan. Karena Kota Blitar merupakan kota yang sangat giat melakukan pembangunan maka kedepannya setiap pembangunan yang ada dapat di selaraskan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Adanya gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan di Kota Blitar.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai relasi antara pemerintah dan masyarakat terkait tata kelola pembangunan di Kota Blitar.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara pemerintah, masyarakat dalam mewujudkan partisipasi politik dalam pembangunan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam pembahasan ini peneliti mengupas hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penetapan fokus yang diambil oleh peneliti. Sekaligus untuk menyajikan konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai kerangka berpikir untuk mengupas beberapa masalah yang peneliti sudah paparkan dirumusan masalah mengenai “Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*”.

2.1 Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*” peneliti membutuhkan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan untuk mengkaji fokus pembahasan, juga penelitian yang dilakukan mempunyai maksud khusus diantaranya adalah untuk melengkapi dari penelitian terdahulu serta melakukan pengkajian dengan fokus yang berbeda.

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Rozikin dengan judul *Analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Batu*, yang diterbitkan pada 2012.¹

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan berkelanjutan dengan fokus kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan agropolitan di Kota Batu belum berjalan secara optimal, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun belum bisa dikaitkan dengan keberhasilan kebijakan agropolitan. Sedangkan jika dilihat secara garis besar *out put* yang ada pada keseimbangan

¹M Rozikin. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu*. 2012. Malang. Universitas Brawijaya.

sosial budaya dari pelaksanaan agropilitan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak hal-hal yang belum terakomodir dan terjamin secara baik dalam kebijakan agropolitan ukuran-ukuran adanya keberlanjutan sosial dan budaya.

Penelitian dari M. Rozikin memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu terkait lokasi penelitian, jika peneliti mengambil lokasi Kota Blitar lain halnya dengan peneliti yang mengambil lokasi Kota Batu. Adapun kesamaan diantara keduanya adalah metode yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan antara peneliti dan peneliti memiliki kesamaan penggunaan konsep *sustainable development*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun dengan judul penelitian *Evaluasi Dampak Pembangunan Kawasan Bumiaji Berbasis Agroindustri Menuju Terwujudnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup (suatu Kajian Sustainable Development Berwawasan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Batu)*, yang diterbitkan pada 2012.² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses dan dampak pembangunan kawasan berbasis agro industri di Kecamatan Bumiaji, serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan di wilayah agro industri Bumiaji dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian tersebut adalah proses pembangunan kawasan berbasis agroindustri di Kecamatan Bumiaji merupakan kegiatan yang sah berdasarkan legal formal dan dilakukan pendampingan dan pengawasan secara baik oleh Pemerintah Daerah. Dilihat dari dampak sosial, dan ekonomi proses pembangunan terselenggara secara positif karena

²Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun. *Evaluasi Dampak Pembangunan Kawasan Bumiaji Berbasis Agroindustri Menuju Terwujudnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup (suatu Kajian Sustainable Development berwawasan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Batu)*.2012. Depok. Universitas Indonesia.

mampu membawa perubahan. Sedang untuk dampak bagi lingkungan justru cenderung negatif disebabkan kurangnya pengolahan limbah yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitar pusat industri.

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun, dengan peneliti terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah *object's site* dimana peneliti melakukan penelitian dampak pembangunan di Kelurahan Bumiaji yang merupakan pusat kegiatan agroindustri, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Blitar dan berfokus kepada *sustainable development* sebagai perspektif dalam tata kelola pembangunannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susi Lastrika Sinaga dengan *Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang dalam Pembangunan Berkelanjutan (studi pada Bappeda Kota Malang)*, yang diterbitkan pada tahun 2012³. Fokus skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemerintah Kota Malang menyikapi pembangunan berkelanjutan khususnya Bappeda Kota Malang yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai sudut pandang *Good Governance*. Sedangkan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Malang dalam pembangunan berkelanjutan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan pembangunan Kota Malang dalam pembangunan berkelanjutan tersebut agar tercapai dengan baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan yang disusun oleh Bappeda Kota Malang mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan indikator pada visi Bappeda Kota Malang tahun 2009-2013 mengenai pembangunan berkelanjutan.

³Susi Lastrika Sinaga. *Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang dalam Pembangunan Berkelanjutan (studi pada Bappeda Kota Malang)*. 2012. Malang. Universitas Brawijaya

Persamaan dalam skripsi ini terdapat dalam penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai landasan teoritis, sedangkan untuk perbedaan terdapat pada *object's site* peneliti mengambil tempat di Bappeda Kota Malang sedangkan peneliti mengambil Kota Blitar sebagai *Object's site* dan Bappeda Kota Blitar merupakan salah satu sumber informasi dan tempat pengambilan data.

Keempat, adalah penelitian yang dilakukan oleh Selvia Rosy Erdha Okta Reza dengan judul *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus pada badan Lingkungan Hidup Kota Malang)*, yang diterbitkan pada 2014⁴. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup di Kota Malang.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Malang serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap sektor ekonomi, sosial dan lingkungan itu sendiri, dimana data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian dari Selvia Rosy Erdha Okta Reza memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu terkait lokasi penelitian, jika peneliti mengambil lokasi Kota Blitar lain halnya dengan peneliti yang mengambil lokasi Kota Malang. Adapun kesamaan diantara keduanya adalah metode yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

| | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Nama Peneliti | M Rozikin. | Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun | Susi Lastrika Sinaga | Selvia Rosy Erdha |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|

⁴Selvia Rosy Erdha Okta Reza. *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus pada badan Lingkungan Hidup Kota Malang)*.2014. Malang. Universitas Brawijaya.

| | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|
| | | | | Okta Reza |
| Judul Penelitian | Analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Batu | Evaluasi Dampak Pembangunan Kawasan Bumiaji Berbasis Agroindustri Menuju Terwujudnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup (suatu Kajian <i>Sustainable Development</i> berwawasan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Batu) | Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang dalam Pembangunan Berkelanjutan (studi pada Bappeda Kota Malang) | Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| Tujuan Penelitian | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan berkelanjutan dengan fokus kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu | a. Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses dan dampak pembangunan kawasan berbasis agroindustri di kawasan Bumiaji b. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terwujudnya upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan di wilayah agroindustry Bumiaji | a.Menganalisis kinerja pelaksanaan pembangunan Kota Malang dalam Pembangunan Berkelanjutan b.Menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan pembangunan Kota Malang dalam pembangunan berkelanjutan tersebut agar tercapai dengan baik | a.Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Malang |
| Metode penelitian | Deskriptif Kualitatif | Deskriptif kualitatif | Deskriptif kuantitatif | Deskriptif kualitatif |
| Teori penelitian | -Konsep Pembangunan Berkelanjutan -Kebijakan Agropolitan | - Kebijakan Publik - Konsep Pengembangan Kawasan -Pembangunan Berkelanjutan | -Pembangunan Berkelanjutan - <i>Good Governance</i> | -Paradigma administrasi publik -Konsep kebijakan publik -Pembangunan berkelanjutan |
| Object's site | Kota Batu, Jawa Timur | Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur | Bappeda Kota Malang, Jawa Timur | Kota Malang, Jawa Timur |

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017



Peneliti mengambil 4 (empat) sampel penelitian terdahulu dalam penyajiannya tentunya terdapat kesamaan dan perbedaan pada cara dan usaha penelitiannya, namun yang membedakan penelitian ini dengan yang lain terdapat pada fokus penelitian mengenai tata kelola pembangunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

2.2 Dasar Teoritis

2.2.1 Teori Pembangunan

Pembangunan khususnya di Indonesia menjadi *key word* di setiap lini. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.

Logika umumnya kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka pembangunan pada umumnya diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan tidak hanya dalam bidang ekonomi melainkan pembangunan bidang sosial, sumber daya dan teknologi.

Menurut Soetomo pembangunan merupakan proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda dan dapat dilihat dari faktor yang mendorong dari internal ataupun eksternal. Sebagai proses perubahan dapat dilihat juga dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat dengan pandangan dan penjelasan yang berbeda seperti pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat dan swasta. Perbedaan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut baik tingkat lokal, regional, atau pun nasional.

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar.⁵ *Development is not a static concept. It is continuously.* Yang memiliki arti bahwa Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Bisa dikatakan bahwa pembangunan

⁵Ismail Nawawi. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

itu sebagai “*never ending goal*”. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining proces*) tergantung pada manusia dan struktur sosialnya⁶. Jadi tidak hanya dikategorikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan bergantung pada suatu *innerwill* dan proses emansipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin karena proses pendewasaan.

Menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution (2004), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu⁷. Terdapat kecenderungan, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan sering dengan itu, dalam masyarakat secara general. Sebagai suatu istilah teknis pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.⁸

Pembangunan adalah suatu proses secara sengaja dimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau non fisik dari suatu masyarakat, sehingga pembangunan dapat dikur dengan beberapa indikator, diantaranya:⁹

1. Kekayaan
2. Pemerataan
3. Kualitas kehidupan
4. Kerusakan lingkungan
5. Keadilan sosial dan kesinambungan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Zulkarimen Zulkarnain. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 89

⁹ Mohtar Gustomy. 2014. *Teori Pembangunan. Prodi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya. 2014. hlm. 9

Mengukur pembangunan bisa dilihat dari indikator, antaranya¹⁰: *Pertama* Kekayaan, rata-rata pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Mengukur produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut tiap tahunnya. Diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB)/ Gross National Product (GNP). *Kedua*, Pemerataan pemerataan ini menggunakan indeks gini dan prosentase PNB/kapita. agar dapat mendapat gambaran yang lebih majemuk, seperti pemerataan kekayaan. *Ketiga*, Kualitas Kehidupan, dengan mengukur harapan hidup kematian bayi, melek aksara. Hal ini agar dapat mengetahui kompleksnya konsep pembangunan. *Keempat*, Kerusakan Lingkungan, faktor yang baru ini dimasukkan agar terjadi kesinambungan dari pembangunan agar lebih mengutamakan lingkungan. *Kelima*, Kesinambungan dan keadilan sosial, pembangunan yang berhasil terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan agar tidak terjadi kerusakan sosial dan kerusakan alam.

Persoalan pembangunan berkelanjutan saat ini memerlukan suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang lebih fokus pada penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan pada bagian huku dari daur pengambilan keputusan, yaitu tingkat kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Dengan kata lain upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan lebih efektif apabila fokus penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan dilakukan seawal mungkin.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan strategi baru yang berperan (1) memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui melalui pilihan KRP yang lebih tepat, (2) meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan. atau instrumen persoalan lingkungan hidup lainnya, dan (3) memungkinkan dilakukannya identifikasi menculnya dampak lingkungan potensial, termasuk

¹⁰ *Ibid.*

yang bersifat kumulatif dan dampak tidak langsung, pada tahap awal dalam proses pembangunan.

Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (*cross boundary environmental effect*) dan lintas sektor.

Penanganan dampak lintas wilayah dan lintas sektor ini dapat diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan Lingkungan Hidup yang semakin kompleks, dan juga dapat menjadi suatu cara untuk meyakinkan bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan KRP pembangunan, dan dengan keberlanjutan dapat lebih terjamin.¹¹

2.3 Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

2.3.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dimunculkan sebagai solusi dalam mengimbangi pembangunan dengan menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan. Konsep ini disepakati sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi hak-hak generasi yang akan datang. Konsep ini terkandung dua ide yang penting, diantaranya: gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kebutuhan manusia, dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan¹².

Konsep *sustainable development* merupakan konsep yang sederhana namun memiliki kerumitan tersendiri. Setidaknya mengandung dua dimensi: *pertama* dimensi waktu karena

¹¹Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gajah Mada Press. : Yogyakarta. Hlm.46

¹²Fauzi A. *Rethinking Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam. Artikel dalam Buku Orange Book ; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global*. Bogor. IPB Press. 2009. hlm

keberlanjutan pasti mencangkup dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan *kedua* dimensi interaksi antara sistem ekonomi dengan pendekatan yang lebih ekologis¹³.

Sedangkan menurut Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau *World Commission on Enviromental and Development* (WCED) mendefinisikan bahwa "*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" yang berarti bahwa pembangunan

berkelanjutan adalah pembangunan yang dimaskudkan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri¹⁴. Menurut WCED, konsen yang utama mencakup dua aspek *pertama* tentang kebutuhan (*needs*) merujuk kepada perekonomian, suatu negara yang masih berkembang atau miskin perlu mendapatkan bantuan dari negara yang sudah dinyatakan maju. *Kedua*, tentang keterbatasan (*limitation*) perlunya regulasi yang pro terhadap pembangunan lingkungan, karena sifat dari sumberdaya alam yang terbatas seperti pertambangan minyak¹⁵.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa definisi diatas, bahwa pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Develompment*) adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya seperti eksploitasi sumberdaya alam, arah investasi, orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan kesemuanya akan berada dalam posisi yang seimbang. Karena pembangunan yang berlangsung akan mengedepankan pemenuhan kebutuhan generasi terkini dengan tanpa mengindahkan kebutuhan generasi mendatang, dimana ketika hari ini sumberdaya alam sudah habis karena eksploitasi maka generasi mendatang tidak akan mendapat sumberdaya yang sama seperti yang disediakan oleh alam pada masa sebelumnya.

Maka dari itu solusinya adalah pembangunan ekonomi, sosial dan budaya harus diupayakan

¹³Fauzi A. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia 2004. hlm 28

¹⁴Sudharto P. Hadi. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Jogja. Gajahmada University Press. hlm 2

¹⁵*Ibid.*

secara keberlanjutan dengan lebih berorientasi pada ketersediaan sumberdaya alam yang mampu memenuhi kebutuhan manusia kini dan nanti.

2.3.2 Sejarah Lahirnya Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pandangan atau sikap masyarakat tempo dulu terhadap lingkungan sangat bersifat praktis, yakni bahwa pandangan manusia terhadap lingkungan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan contohnya air, penyediaan makanan serta perlindungan. Perhatian itu bahkan tidak ditemukan di Eropa pada abad pertengahan, ketika alam bisaa dipandang dengan penuh rasa curiga, khawatir, dan ketidak tahuan¹⁶. Sebagai contoh krisis lingkungan yang terjadi sekitar dasawarsa 1960-an dan 1970-an dipandang sebagai masalah negara – negara kaya dan sebagai efek samping dari keserakahan negara industri.

Tentunya hal itu berlawanan dengan tujuan pembangunan yang secara umum memiliki maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut dianggap tidak memberikan tawaran jangka panjang bagi generasi mendatang karena dalam pembangunan yang mereka tawarkan masih menggunakan paradigma pembangunanisme dan neoliberalisme yang sangat ekonomi sentris.¹⁷ Pada akhirnya, lingkungan yang merupakan instrumen tidak terpisahkan dari aktivitas manusia menjadi korban.

Permasalahan–permasalahan yang timbul akhirnya membangunkan kesadaran manusia untuk menghidupkan hubungan yang romantis kembali antara alam dan manusia. Salah satu gagasan yang lahir adalah mengenai pembangunan berkelanjutan yang dimulailah dengan terbitnya *Brundland Report* pada tahun 1980 semakin diintensifkan melalui Konferensi

PBB mengenai “Lingkungan Hidup dan Pembangunan” di Rio De Janeiro, Brasil 1992¹⁸.

Konferensi ini melahirkan agenda 21 yang ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagai

¹⁶Anthoni J.C dan James C. Snyder. *Perencanaan Kota*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1989 . hlm 339

¹⁷*ibid.* hlm 343

¹⁸*Ibid.*

langkah kongkret menyikapi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada skala global.¹⁹

2.3.3 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan penjelasan diatas, *sustainable development* tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial. Beberapa indikator yang menjadi syarat pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Prinsip-Prinsip Sustainable Development

| DIMENSI | WCED .1987 | Brundtland, G.H 1987 | ICPQL. 1996 | Becker, F et al. 1997 |
|-------------------|--|---|---|---|
| Sosial | 1.keadilan sosial 2.Kesempatan menentukan nasib sendiri | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua | 1.Keadilan sosial 2.kesetaraan jender 3.rasa aman 4.menghargai diversitas budaya | Penekann pada proses pertumbuhan yang dinamis, keadilan sosial dan kesetaraan |
| Ekonomi | Pemenuhan kebutuhan manusia | Pemenuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Ekonomi kesejahteraan | Ekonomi kesejahteraan |
| Lingkungan | Pemeliharaan integritas ekologi | Lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan dating | Keseimbangan lingkungan yang sehat | Lingkungan adalah dimensi sentral dalam proses social |

Dari banyaknya prinsip yang dimiliki pada konsep *sustainable development*, peneliti mengadopsi 4 (empat) definisi menurut Jacob yang dijadikan acuan untuk melihat penerapan *sustainable development* dalam tata kelola pembangunan di Kota Blitar. Berikut adalah empat prinsip *sustainable development* yang menjadi rujukan pendukung dalam penelitian²⁰:

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*)

¹⁹M. Fani Cahyandito. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekologi, Ekonomi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*.2006. hlm 2. Diunduh pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 22.30 WIB.

²⁰Sudharto P.Hadi.2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Hlm.6



Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yang disebut kebutuhan materi didalamnya termasuk sandang, pangan dan papan. Kebutuhan non-materi meliputi rasa aman, hak asasi manusia, memiliki kesempatan untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat. Kebutuhan non-materi tercerminkan kedalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan. Kebutuhan non-materi terkait erat dengan partisipasi demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu mempengaruhi kualitas keputusan, karena masyarakat adalah pakar local dalam artian lebih memahami kondisi dan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of the process*. Kebutuhan non-materi ini terkait erat dengan komponen keempat yakni partisipatori demokrasi.

b. Pemeliharaan integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*)

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan memiliki 2 (dua) indikator, *pertama* adalah konservasi maksudnya adalah perlindungan lingkungan. Lingkungan, baik sebagai sumber daya maupun ruang yang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumberdaya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Setiap usaha / kegiatan harus diatur agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sebagai ruang. Prinsip (b) ini sebenarnya sangat terkait dengan dengan prinsip (a) diatas, dimana kerusakan lingkungan akan mengambat pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan telah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri.

Kedua, prinsip mengurangi konsumsi dalam misalnya Indonesia sebagai negara berkembang yang terjadi adalah jumlah penduduknya mencapai dua pertiga penduduk dunia tetapi konsumsinya hanya sepertiga. Dalam konteks ini para pakar

lingkungan menjuluki sebagai *less consumption*. Perubahan pola konsumsi di tujukan kepada siapa saja, agar mengurangi beban bumi. Persoalan lingkungan yan dipicu oleh pola konsumsi dalam bentuk pencemaran dan kemacetan lalu lintas di perkotaan akan memicu keberingasan sosial sikap yang tidak saling menengang rasa. Contoh solusi perubahan pola konsumsi adalah seharusnya merubah cara berkendara dari pribadi ke umum atau berkelompok (*car poll*).

c. Keadilan Sosial (*social equity*)

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan yang *pertama* adalah, keadilan masa kini menunjukkan perlunya keadilan dan kesetaraan akses dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Tanpa pemerataan akan menimbulkan ketimpangan, keadilan masakini juga berdimensi luas termasuk didalamnya pengalokasian sumberdaya alam antara daerah dan pusat. *Kedua*, keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antara generasi dengan menghargai diveristas budaya dan kesetaraan jender. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) atas sumberdaya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

d. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*)

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipasi demokrati. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas dasar hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumberdaya alam. Sedangkan prinsip-partisipasi demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka

masyarakat sehingga mereka rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi disekitar mereka.

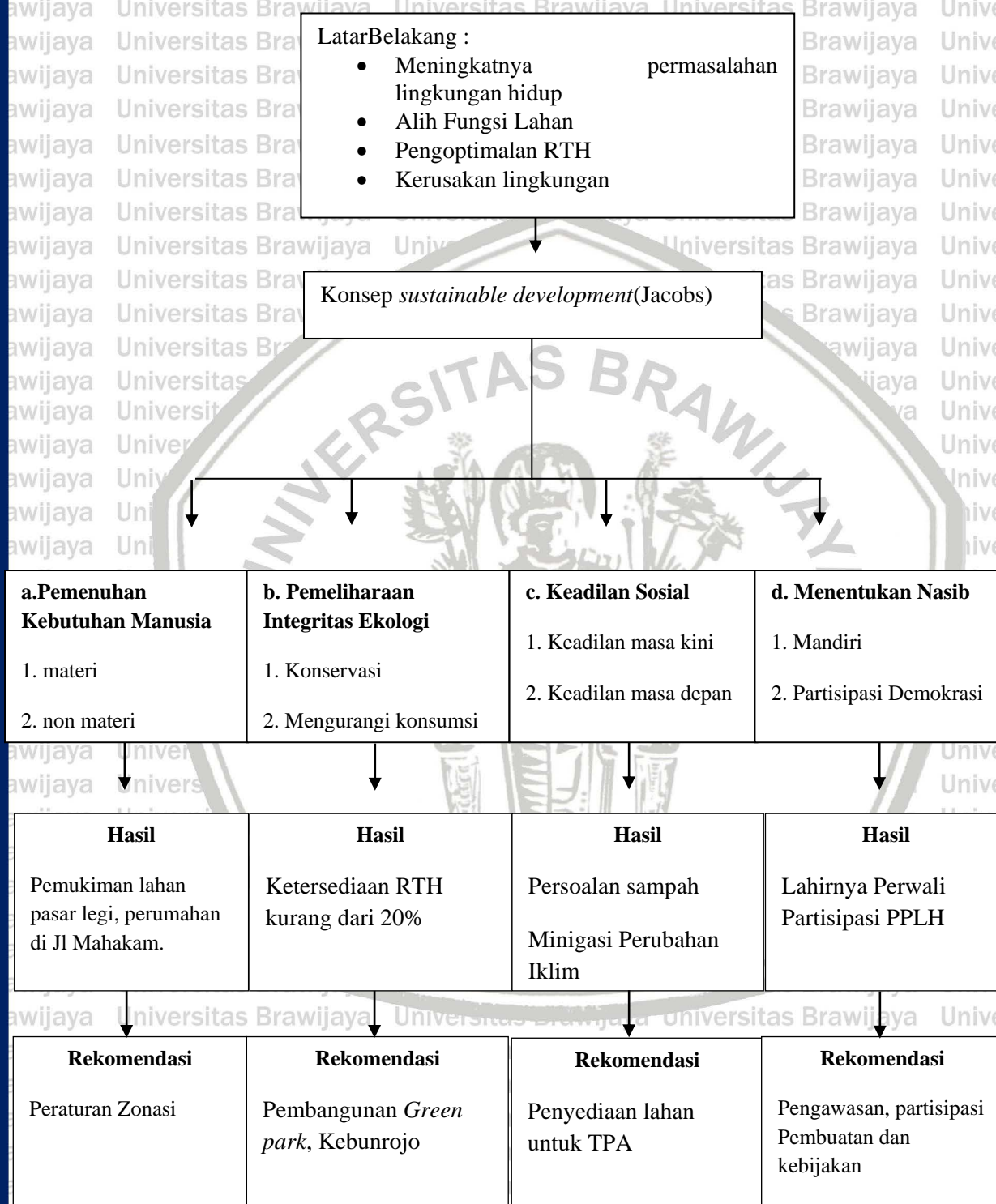
2.4 Alur Pikir Penelitian

Secara sederhana alur pikir yang dibuat peneliti sebagai sarana mempermudah peneliti untuk mencari data dan menganalisis dan memaparkan hasil analisa, pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, hingga konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan alur pikir sebagai berikut.



Bagan 2.1

Alur Pikir Peneliti



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik atau cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,¹ termasuk untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disampaikan. Adapun fungsi dari metode penelitian sendiri adalah untuk menjelaskan proses dan cara pengambilan informasi, tentunya semakin jelas dan detail metode penelitian yang dilakukan akan berpengaruh pada kemudahan peneliti terjun dilapangan. Pembahasan pada Bab ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya, jenis penelitian yang digunakan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Selanjutnya metodenya adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai terhadap judul penelitian “*Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif Sustainable Development*”. Jenis data yang di pergunakan diantaranya data primer dan data sekunder yang akan didapat dengan teknik wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi dalam proses pengumpulannya.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang pembangunan lingkungan di Kota Blitar dalam perspektif *sustainable development*. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif analisis. Penelitian kualitatif secara umum adalah metode untuk mendapatkan kebenaran dan bisa digolongkan kedalam penelitian yang ilmiah yang di bangun atas dasar

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*, Bandung, CV.Alfabeta, 2008.
Hlm.2

teori – teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik.

Dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data yang seadanya dan asal asalan melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlak meliputi sudut pandang atau proses yang sedang terjadi.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Sedangkan untuk penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mempelajari masalah – masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Model penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi terbaru, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi dan sumber data bisa berupa kata – kata, dan gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, catata lapangan, foto, video dokume pribadi, catatan atau memodan dokumen resmi lainnya. Dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi - informasi mengenai keadaan yang ada.³

Penelitian ini berhenti apa bila data yang didapat sudah dirasa cukup dan mampu disajikan dalam bentuk deskriptif dengan jelas oleh peneliti. Hasil akhir akan berupa tarikan kesimpulan dari hipotesis yang sudah ditentukan dari seluruh hasil penelitian. Tarikan ini harus mampu menjawab dan memberikan informasi yang baru yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada, mampu menjadi rujukan informasi dimasa yang akan datang.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm.6.

³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999. Hlm 26

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai pembatasan, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terstruktur dan tidak melenceng dari fokus yang sudah ditetapkan.

Penelitian kualitatif memiliki fokus yang berkaitan erat dengan rumusan masalah, dan rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan. Tentunya hal ini sesuai dengan sifat dari penelitian kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang *empirical induktif*, dimana segala sesuatunya ditentukan oleh hasil akhir data yang bisa dikumpulkan karena data yang didapat adalah cerminan dari kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya dalam konteks penelitian ini, fokus penelitiannya terletak pada pembangunan lingkungan di Kota Blitar. Apakah pembangunan lingkungan di Kota Blitar sudah berjalan sesuai dengan konsep *sustainable development* atau belum sepenuhnya berjalan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari skripsi dengan tema "*Pembangunan Kota Blitar dalam Perspektif Sustainable Development*" berada di Kota Blitar. Dalam penelitian yang di fokuskan pada pembangunan lingkungan di Kota Blitar peneliti mengkaji lebih dalam seputar pembangunan lingkungan secara keseluruhan. Di sisi lain masih kurangnya pembahasan seperti ini di Kota Blitar yang kemudian menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti sebagai bagian dari masyarakat

Kota Blitar untuk mendukung perkembangan dan kemajuan yang ada di Kota Blitar.

Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, diantaranya Bappeda Kota Blitar, Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Perumahan Kota Blitar, Dinas Pertanian, Perikanan dan peternakan Kota Blitar sebagai *site object* dari penelitian; dikarenakan Bappeda Kota Blitar mengetahui seluk beluk pembangunan di Kota Blitar, BLH Kota Blitar merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tanggungjawab terkait pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada PERDA Kota Blitar No 4 Tahun 2013 dan Perwali Kota Blitar No 40 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BLH melakukan urusan wajib non pelayanan dasar. Terdapat juga Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar yang memiliki andil dalam perencanaan serta pembangunan sarana prasarana dan Infrastruktur penunjang kegiatan bagi masyarakat dan juga Badan Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Asumsi awal peneliti disini adalah, bahwa instansi tersebut memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan, pembangunan yang ada di Kota Blitar, tentunya terdapat data primer yang digunakan sebagai bahan pengerjaan penelitian skripsi ini.

3.4 Jenis Data

Untuk menunjang hasil penelitian yang akurat, peneliti berusaha mengumpulkan data sebagai unsur penunjang dalam penelitian. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalah jenis data kualitatif sebagai metode dalam mencari data. Data kualitatif merupakan data yang perlu adanya penjelasan secara luagas

berbentuk kalimat serta rangkaian kata yang terdeskripsikan. jenis data kualitatif dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Data Primer

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dilakukan oleh peneliti maka penggunaan data primer merupakan keharusan. Pengertian data primer sendiri adalah data yang di dapat melalui metode wawancara dan observasi secara langsung kepada sumber data. Data yang di maksud adalah yang berasal dari pihak yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pembangunan seperti halnya BLH Kota Blitar, Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar Bappeda Kota Blitar dan masyarakat Kota Blitar. Terdapat juga lembaga lain seperti DPRD Kota Blitar sebagai *check and balance* terhadap kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah.

2. Data Sekunder

Sebagai pendukung dari data primer tentunya harus ada data sekunder, data ini bersumber dari pihak diluar sumber data utama. Data sekunder bisa berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen terkait, majalah, *website*, karya tulis ilmiah dan juga jurnal dan literatur yang bisa menjadi pendukung lainnya. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Regulasi bisa berupa undang – undang, Peraturan Daerah (Perda).

b. Arsip-arsip dinas terkait seperti LAKIP, gambaran khusus pembangunan tata kelola pembangunan daerah, Majalah Pemda, *website* dinas terkait dan Pemda Kota Blitar.

c. Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan walikota atau kepala dinas (SK) dan APBD pemerintah daerah Kota Blitar.

Tabel 3.1

Data Sekunder yang Digunakan Dalam Penelitian

| No | Nama Data | Urgensi | Teknik Analisis |
|----|--|---|--|
| 1 | Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 2 | Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 Tentang Batas wilayah kotamadya tingkat II | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 3 | RTRW Kota Blitar 2010-2030 | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 4 | Peraturan Walikota No.25 Tahun 2013 Tentang APBD Kota Blitar | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 5 | Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang. | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 6 | Peraturan Daerah Kota Blitar No 12 Tahun 2011 Tentang RTRW | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 7 | Buku Renstra Kota Blitar 2016-2021 | Data yang didapatkan pada saat penelitian dan diolah dalam pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 8 | Data RTH di Kota Blitar | Data yang didapatkan pada saat penelitian dan diolah dalam pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan |
| 9 | Peta penggunaan Lahan di Kota Blitar | Data yang didapatkan pada saat penelitian dan diolah dalam pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan |
| 10 | Buku Renja Kota Blitar | Digunakan sebagai dasar regulasi untuk pembahasan | Penyediaan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. |
| 11 | Dokumen PPID Kota Blitar | Data yang didapatkan pada | Penyediaan data, |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| | 2017 | | saat penelitian dan diolah dalam pembahasan | reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, |
| 12 | Buku Pembangunan Berkelanjutan | | Buku ini digunakan untuk melihat teori yang digunakan dalam penelitian ini | Penyediaan reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, data, |
| 13 | Buku Perencanaan Kota | | Buku ini digunakan untuk mencari makna dari perkotaan | Penyediaan reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, data, |
| 14 | Buku KLHS menuju Pembangunan Berkelanjutan | | Buku ini digunakan untuk pedoman dalam penelitian ini | Penyediaan reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, data, |
| 15 | Komunikasi Pembangunan | | Buku ini digunakan untuk mengetahui teori pembangunan | Penyediaan reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, data, |
| 16 | Buku Teori Pembangunan | | Buku ini digunakan untuk mengetahui teori pembangunan | Penyediaan reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, data, |
| 17 | Buku Pembangunan & Problema Masyarakat | | Buku ini digunakan untuk mengetahui menyelesaikan | Penyediaan reduksi penyajian kesimpulan. | data, data, |

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|
| | | sebuah permasalahan | penyajian data, kesimpulan. |
|--|--|---------------------|-----------------------------|

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2017

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu pengumpulan data secara kualitatif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata, kalimat, pernyataan dan gambar.

3.5.1 Observasi

Salah satu instrumen dalam mendapatkan data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan teknik mengamati perilaku kejadian atau kegiatan orang tau sekelompok orang yang detail. kemudian mencatat hasil pengamatan yang sudah dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Peneliti dapat mengambil kejadian yang berlangsung sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap merasakan, fenomena sesuai dengan perspektif dari subyek dan obyek yang diteliti. Dalam melakukan observasi peneliti melakukan apa yang narasumber lakukan, hal ini bisa dikatakan mengikuti sekaligus meniru namun disisi lain yang di lakukan oleh peneliti adalah untuk mengambil informasi yang dikemukakan oleh narasumber baik secara langsung ataupun tidak langsung karena sifat observasi yang lebih mengalir.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*, Bandung, CV.Alfabeta, 2013. Hlm.224



Peristiwa yang bisa diamati oleh peneliti adalah apa yang narasumber sedang kerjakan, mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.⁵ Jadi observasi ini adalah kegiatan pengumpulan data dengan mengedepankan pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar – benar bisa berbaur diantara narasumber.

3.5.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau (*in-deep inteview*) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung antara pewawancara dengan narasumbernya. Penelitian kualitatif yang dilakukan dapat menggabungkan antara dua metode pencarian data ini karena menurut Sugiyono, selama melakukan observasi peneliti juga bisa sekaligus melakukan wawancara secara mendalam.⁶

Wawancara sendiri terbagi atas dua macam, wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.⁷ Sebagai usaha untuk mendapatkan data yang penuh makna maka peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur karena peneliti dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. Disinilah peran dari peneliti sebagai instrumen utama sehingga tidak harus selalu terpancang pada panduan wawancara.

Teknik wawancara yang tak terstruktur yang peneliti pilih lebih menekankan kepada keterampilan yang dimiliki oleh peneliti dalam mendapatkan

⁵*Ibid.* Hlm.86

⁶*Ibid.* Hlm.89

⁷James A. Black dan Bean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009. Hlm. 314

kepercayaan dari narasumber. Topik yang ditanyakan peneliti mencakup seputar mekanisme, dampak, kendala dan pendukung pembangunan lingkungan yang ada di Kota Blitar. Sebelum peneliti turun kelapangan untuk melakukan penelitian, sebelumnya peneliti sudah menentukan narasumber untuk diwawancarai, diantaranya :

Tabel 3.2

Daftar Informan Penerlitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Pande Ketut S., SH | Kepada BLH Kota Blitar |
| 2. | Drs. Hermansyah Permadi M.Si | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar |
| 3. | Annas, ST | Staff Ahli bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar |
| 4. | Drs. EC. Priyo Istanto | Kepala Bappeda Kota Blitar |
| 5. | Kenyo Anggun Popularita, ST | Kepala Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM, dan Pembangunan Prasarana Bappeda Kota Blitar |
| 6. | Ir. Herlyn Krisnawati | Kepala Perencanaan Prasarana RT/W Bappeda Kota Blitar |
| 7. | Deny eko Prisanto | Kasubdit Pengendalian Dampak Masyarakat |
| 8. | Imam Sholikin | Kasi Pemanfaatan ruang kota |
| 9. | Christina Ratnawati, SP | Kasi Produksi Tanam Pangan & Hortikultural. |

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2017.

3.5.3 Kajian Pustaka

Untuk mengumpulkan data skunder, metode yang dilakukan adalah melalui kajian pustaka dengan cara menganalisis berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan penelitian, serta dokumen – dokumen pendukung lainnya seperti majalah, jurnal, karya ilmiah, internet dan lain – lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang sebelumnya telah dilakukan dengan wawancara mendalam. Melalui studi kepustakaan inilah peneliti memanfaatkan berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu pembangunan di Kota Blitar.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang mampu melengkapi pencari data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti halnya foto kegiatan, tulisan serta dokumen yang bersifat monmental lainnya.⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai data yang sifatnya sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini kebanyakan berupa gambar dan tulisan selama kurun waktu pemerintahan waliKota Blitar periode satu tahun masa jabatan atau tahun 2010 hingga 2015, untuk yang berbentuk gambar bisa berupa foto kegiatan. Untuk dokumen yang berbentuk teks bisa berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Peraturan Daerah (Perda), surat keputusan walikota Bliyat tentunya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),

⁸Op.Cit. Hlm.82

suarat keputusan kepala dinas, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Undang – undang terkait PPLH dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari lapangan tentunya masih berupa data mentah dan masih perlu di olah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang di harapkan, oleh karena itu diperlukan usaha dalam pengolahan data yaitu dengan teknik analisis. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles dan Huberman, karena dirasa sesuai dengan teknik penelitian kualitatif. Proses – proses analisis yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman terdiri kedalam empat langkah diantaranya⁹:

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data antara lain peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek peneliti, responden, observasi, catatan lapangan berinteraksi antara peneliti dan lingkungan penelitian.

Kesemuanya adalah bagian dari proses pengambilan data yang dimana data yang didapat dirasa cukup untuk di proses dan dianalisis maka tahap selanjutnya melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Data yang di dapat dari lapangan jumlahnya bisa terlalu banyak padahal belum tentu semuanya dapat digunakan. maka dalam proses reduksi data terdapat proses seleksi, abstraksi, transformasi dan kemudian disederhanakan dari data kasar yang ada di lapangan.

⁹Sugiyono, *Op.Cit.*Hlm.91

3. Penyajian/Display Data

Pendiskripsian kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah yang sejak awal dibuat, perlu dike tahui juga bahwa rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan terus berkembang. Temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang masih remang – remang. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang sudah ada, berdasarkan uraian diatas dengan pendekatan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 3.1

Teknik Analisis Data



(Sumber : Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.,(Prof. Dr.Sugiyono,)

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini memfokuskan pembahasan kepada perkembangan yang terjadi di Kota Blitar dari dulu hingga sekarang. Mencakup juga mengenai pembangunan lingkungan. Pembahasan di bagi menjadi 3 (tiga) sub-bab diantaranya *Pertama*, Sejarah Singkat Kota Blitar dan Aspek Geografis Kota Blitar. *Kedua*, Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar. *Ketiga*, Gambaran dan Peran Dinas-Dinas yang berperan dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. Bab ini digunakan sebagai penghubung dengan bab selanjutnya serta sebagai pengantar untuk mengetahui secara luas tentang Kota Blitar dan gambaran pembangunan lingkungan.

1.1 Gambaran Umum Kota Blitar

1.1.1 Sejarah Kota Blitar

Berdirinya Blitar diprakarsai oleh Nilasuwarna atau Gusti Sudomo, anak adipati Wilatika Tuban. Blitar dahulunya adalah hamparan hutan yang masih rimbun, singkat cerita Nilasuwarna yang merupakan orang kepercayaan Kerajaan Majapahit ditugaskan untuk menumpas pasukan Tartar yang bersembunyi dibagian selatan pulau Jawa, tugas tersebut berhasil diselesaikan sebagai imbalannya diberikan tanah yang berada di hutan selatan yang kemudian diberi nama Balitar (Bali Tartar) atau kembalinya pasukan Tartar.

Blitar tidak lepas dari dampak Kolonialisme Belanda terbukti eksistensi Kadipaten Blitar berakhir pada masa itu, dan secara administratif Belanda mengeluarkan *Staatsblad van Nederlanche Indie* Nomor 150 tanggal 1 April 1906



pakunden menjadi 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari. Berikut adalah rincian masing-masing luas wilayah kelurahan dan kecamatan :

Tabel 4.1
Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar

| Kecamatan | Kelurahan | Luas wilayah (Km) | % Terhadap Luas Kota Blitar |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| I. Sukorejo | 9.9246 | | 30.46 |
| | 1. Tlumpu | 1,0153 | 3.11 |
| | 2. Karang Sari | 0,8824 | 2,70 |
| | 3. Turi | 0,5086 | 1.56 |
| | 4. Blitar | 1,33205 | 4.08 |
| | 5. Sukorejo | 1,4662 | 4.50 |
| | 6. Pakunden | 2,262 | 6,94 |
| | 7. Tanjungsari | 2,45805 | 7,54 |
| II. Kepanjen Kidul | 10,50234 | | 32.23 |
| | 1. Kepanjenkidul | 0,86703 | 2.66 |
| | 2. Kepanjenlor | 0,61328 | 1,88 |
| | 3. Kauman | 0,68033 | 2.08 |
| | 4. Bendo | 1,5185 | 4.66 |
| | 5. Tanggung | 2,23 | 6.84 |
| | 6. Sentul | 2,683 | 8,23 |
| | 7. Ngadirejo | 1,9102 | 5.86 |
| III. Sananwet an | 12.15155 | | 37.29 |
| | 1. Rembang | 0,84425 | 2,59 |
| | 2. Klampok | 1,5307 | 4.69 |
| | 3. Plosokerep | 1,2481 | 3.83 |
| | 4. Karangtengah | 1,7954 | 5.51 |
| | 5. Sananwetan | 2,1279 | 6.53 |
| | 6. Bendogerit | 1,9552 | 6.00 |
| | 7. Gedog | 2,65 | 8.13 |
| Kota Blitar | | | 32,57894 |

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, BPS 2017

Berdasarkan table 4.1 tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Sentul merupakan kelurahan terluas dengan luas wilayah mencapai 2,683km² atau

mencapai 8,23% dari keseluruhan luas wilayah Kota Blitar. sedangkan kelurahan yang terkecil adalah Kelurahan Turi dengan luas wilayah hanya mencapai 0,5086

km² atau 1,56% dari keseluruhan wilayah Kota Blitar. Sedangkan untuk kecamatan yang terbesar luas wilayahnya adalah kecamatan Sananwetan kemudian Kepanjen Kidul sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sukorejo.

Luas masing masing kecamatan mencapai 37,29% dari luas keseluruhan Kota Blitar untuk Sananwetan, 32,23% dari luas keseluruhan Kota Blitar untuk Kepanjen Kidul dan 30,46% dari wilayah Kota Blitar untuk Kecamatan Sukorejo.

Penggunaan lahan penggunaanya di Kota Blitar terdiri dari sawah, bangunan/pekarangan, tegalan/kebun, kolam/empang dan lain lain. Dari luas lahan keseluruhan Kota Blitar 3.259ha paling banyak diusahakan untuk kegunaan bangunan/pekarangan seluas 51.12% sementara sisasanya adalah sawah seluas 35.04% dan diusahakan untuk yang lainnya adalah 12,44%.

Kondisi topografi Kota Blitar yakni memiliki tingkat kemiringan tanah yang cukup tinggi sebagai pengaruh dari posisinya yang berada dilereng Gunung

Kelud. Dari posisi tersebut ketinggian tanah di Kota Blitar terbagi menjadi tiga (3) bagian yaitu bagian utara, tengah dan selatan dimana bagian utara mempunyai ketinggian ± 245 MDPL, dengan tingkat kemiringan 2° sampai dengan 15° , bagian tengah ± 175 sementara bagian selatan ± 145 MDPL dengan kemiringan 0° sampai dengan 2° , sehingga secara keseluruhan ketinggian rata-rata adalah 156 MDPL.

Secara hidrografi Kota Blitar berupa tanah *regulos* dan *litusol*. Jenis tanah *regulos* berasal dari Gunung Kelud (vulkan) sedangkan tanah *litusol* memiliki

konsistensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap korosi. Dengan demikian tanah di Kota Blitar sangat baik sekali digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Hal ini disebabkan karena kandungan unsure hara banyak terdapat dalam tanah *regulos* dan *litusol*. Posisi Kota Blitar yang berada di lereng Gunung Kelud dan jauh dari laut, sehingga sungai yang melintas wilayah Kota Blitar adalah sungai yang berasal dari Gunung Kelud dan lebih dikenal dengan Sungai Lahar.

Sungai ini mengalir di wilayah Kota Blitar sepanjang $\pm 7,84$ km pada sisi sebelah barat Kota Blitar. Adapun hulu sungai ini adalah Gunung Kelud dan berhilir di Sungai Brantas.

1.2 Pemerintahan Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar memiliki komitmen mewujudkan masyarakat Kota Blitar sejahtera yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan religius. Melalui APBD Pro Rakyat Jilid II, visi yang dibangun oleh pemerintah Kota Blitar mempunyai makna yang mendalam dimana tercapainya kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat³.

Misi *pertama* dan Kota Blitar adalah mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berketuhanan Yang Maha Esa Keseluruhan kegiatan

³ RPJMD 2016.

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakata didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan kepada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

Misi *kedua*, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan diwujudkan melalui perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh melalui perbaikan manajemen, sarana dan prasarana sekolah yang disertai peningkatan profesionalisme dan semangat pengabdian guru, penerapan kurikulum lokal yang berbasis budi pekerti luhur dan wawasan kebangsaan serta menjamin pelaksanaan pendidikan gratis secara sistematis, terkoordinasi dan berlanjut. Misi *ketiga* meningkatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, diwujudkan melalui manajemen sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Daerah yang disertai dengan peningkatan profesionalisme dan semangat pengabdian dokter maupun paramedis dan petugas lapangan serta menjamin kesehatan dasar gratis secara sistematis terkoordinasi dan berlanjut.

Misi *keempat* memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, diwujudkan melalui ekonomi kreatif sebagai lanjutan ekonomi kerakyatan melalui perbaikan system distribusi barang dan jasa unggulan, penguatan kapasitas para pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi yang disertai dengan perbaikan sarana dan

prasarana penunjang perekonomian daerah secara sistematis, terpadu dan berlanjut.

Misi *kelima* memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif dan berdasar prinsip-prinsip otonomi daerah, melalui menjamin terselenggaranya penerapan sistim manajemen pembangunan yang partisipatif dan akuntabel demi terjaganya kelestarian alam dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup generasi mendatang serta demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

1.2.1 Gambaran dan Peran Bappeda, BLH, Dinas PU dan Perumahan, dan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Blitar yang kemudian diejawantahkan kedalam visi

dan misi SKPD melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun).

Gambaran SKPD yang terkait dengan penelitian ini Bappeda Kota Blitar, BLH Kota Blitar, Dinas PU dan Perumahan dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut⁴ :

a. Bappeda Kota Blitar

Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda tersebut adalah pada misi 6 (enam) yaitu

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Intervensi

⁴ *Ibid.*

Bappeda adalah pada capaian indikator sasaran prosentase SKPD dengan Kualitas perencanaan Baik.

b. Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Didasarkan pada Perda Kota Blitar No 4 Tahun 2013 dan Perwali Kota Blitar No 40 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BLH melakukan urusan wajib non pelayanan dasar.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam melalui:

1. Meningkatnya RTH taman kota sebagai sarana rekreasi
2. Meningkatnya kualitas badan air
3. Meningkatnya kualitas udara
4. Meningkatnya kualitas sumber mata air

Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. f ungsi Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang PU dan Perumahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang PU dan Perumahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang PU dan Perumahan.
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Perikanan, Pertanian dan Peternakan

Tugas pokok Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dinas meliputi urusan pangan, pertanian dan peternak ikan.

1.3 Pembangunan di Kota Blitar

Pada sub-bab ini akan membahas mengenai objek pembangunan yang terdapat di Kota Blitar. Pembangunan yang berarti penambahan luas wilayah sudah tidak mungkin dapat dilakukan di Kota Blitar. Namun demikian, potensi pembangunan wilayah bagi Kota Blitar dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Kota Blitar, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun industri pengolahan, akan menimbulkan tuntutan pembangunan wilayah yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pembangunan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik di sector pendidikan, kesehatan,

industri, perdagangan, dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lain⁵.

Guna mewujudkan visi-nya yang memfokuskan pembangunan pada aspek lingkungan, maka instrumen pembangunan berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah di implementasikan sejak 2015, melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Banyak prestasi yang telah diraih oleh Kota Blitar meraih penghargaan ADIPURA selama 10 kali berturut-turut smulai dari tahun 2005-2013. Kemudian Kota Blitar memiliki RTH terluas di Indonesia yaitu sebesar 17% dengan perincian RTH Publik sebesar 10.40% dan 10% RTH Privat. Jika digabungkan prosentasenya sebesar 17% menurut wawancara dengan Kasubdit pengendalian dampak lingkungan mas Denny BLH Kota Blitar.

Kota Blitar yang merupakan daerah terkecil kedua di Jawa Timur memiliki kendala berupa keterbatasan wilayah, berdasarkan dari kedudukan dan letak geografisnya Kota Blitar tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai, karena seluruh wilayahnya merupakan daerah perkotaan yang berupa pemukiman, perdagangan, sarana prasarana publik, persawahan, perkebunan campuran dan pekarangan. Oleh karena itu sebagai penggerak perekonomian Kota Blitar lebih mengandalkan potensi diluar sumberdaya alam, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan⁶. Sedangkan penggunaan lahan di Kota Blitar dibagi menjadi

⁵ Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar 2016.

⁶ Profil Kota Blitar, Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. hlm 7

dua yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah/lahan kering. Lahan sawah Kota Blitar adalah seluas 1.411 ha dan lahan kering seluas 2.115ha⁷.

Karena keterbatasan lahan, Kota Blitar tidak memiliki potensi sumber dayaalam yang memadai. Penggerak ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan wisata dan kawasan perdagangan barang dan jasa. Potensi pengembangan wisata Kota Blitar relatif besar dengan keberadaan Makam Bung Karno sebagai ikon wisata Kota Blitar. Setiap tahun banyak wisatawan yang mengunjungi Kota Blitar terutama untuk mengunjungi makam Bung Karno.

Tabel 4.2

Jumlah Wisatawan Kota Blitar Pertahun

| No | Objek Wisata | Jumlah Wisatawan Pertahun | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Makam Bung Karno | 505.318 | 662.599 | 819.239 | 931.858 | 890.966 |
| 2. | Perpustakaan Bung Karno | 535.041 | 552.248 | 761.286 | 810.698 | 899.875 |
| 3. | Sumber Udel | 81.000 | 67.783 | 70.371 | 65.136 | 75.776 |
| 4. | Pemandian Herlingga Jaya | 79.106 | 71.175 | 154.353 | 73.481 | 71.148 |
| 5. | Istana Gebang | | 1.211.680 | 292.142 | 381.292 | 463.028 |
| | Jumlah | 1.200.465 | 2.565.485 | 2.097.391 | 2.162.455 | 2.400.791 |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Kota Blitar 2016

⁷ Di akses pada www.blitarkota.go.id pada tanggal 10 September 2017.

Berdasarkan tabel di atas jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kota Blitar diantaranya Makam Bung Karno, Perpustakaan Proklamator, Istana Gebang, Waterpark Sumber Udel dan Pemandian Herlingga Jaya mengalami kenaikan dari 1.200.465 pengunjung di tahun 2011 meningkat menjadi 2.162.455 pengunjung di tahun 2015. Berdasarkan potensi di atas, maka di RTRW Kota Blitar 2010-2030, kawasan wisata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata⁸, yakni:

“Kawasan strategis yang akan dikembangkan ada tiga kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategi aspek lingkungan. Kawasan strategis sosial budaya terdiri dari kawasan wisata Makam Bung Karno dan Kawasan Wisata Perjuangan PETA”

Wisata makam Bung Karno dan Kawasan Perjuangan PETA dari dulu sampai saat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun luar kota. Mengingat Kota

Blitar adalah Kota yang melahirkan seorang Ir.Sukarno dan Supriyadi.

Pendidikan Pemerintah Kota Blitar terhadap sektor pendidikan perlu dipertahankan. Pendidikan di Kota Blitar gratis mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Untuk meningkatkan angka lama sekolah sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. APM di jenjang SD dan SMP sudah relatif tinggi, di atas 90%, sedangkan untuk SMA mencapai 80,22%.

Program Pendidikan Gratis yang sudah diimplementasikan sejak Tahun 2011 diharapkan akan meningkatkan APM Kota Blitar. Untuk pendidikan Kota Blitar menyiapkan Bus Sekolah Gratis bagi putera-puteri daerah Kota Blitar. Inovasi ini

⁸Wawancara dengan Bambang selaku Staff Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tanggal 24 November 2016

diberikan untuk memudahkan mobilisasi agar mengurangi bertambahnya alat transportasi pribadi yang berdampak pada lingkungan. Kota Blitar mengembangkan ekonomi kreatif dan UKM dikarekan minimnya sumber daya alam Kota Blitar. Melalui pembangunan berkelanjutan ini Kota Blitar mempunyai sektor unggulan yaitu barang dan jasa. Untuk pertanian yaitu agrowisata yang digunakan sebagai wisata. Untuk bidang perikanan yaitu ikan hias dan ikan koi.



BAB V

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DI KOTA BLITAR DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Pada bab ini, peneliti membahas mendalam terkait pembangunan lingkungan yang ada di Kota Blitar. Pembahasan menggunakan konsep *sustainable development* sebagai pisau analisis. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai pengertian memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang Brundtland (1987). Konsep *sustainable development* memiliki 4 (empat) indikator diantaranya, pemenuhan kebutuhan manusia, pemeliharaan integritas ekologi, keadilan sosial, menentukan nasib.

5.1 Pembangunan Lingkungan di Kota Blitar dalam Perspektif *Sustainable Development*

Seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di seluruh pelosok bumi yang terbentang dari lokal hingga global, langkah-langkah pencegahan timbulnya dampak negatif terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin mendesak untuk ditempuh. Penanggulangan dan pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan hidup serta isu keberlanjutan lingkungan hidup terasa tidak cukup dan kurang efektif jika dilakukan pada saat kegiatan telah memasuki masa operasi dan sepenuhnya hanya mengandalkan pendekatan teknologi.

Salah satu faktor terjadi kerusakan lingkungan adalah pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, yang kemudian timbul-timbul permasalahan seperti air kotor yang

tidak mengalir dalam saluran air atau drainase karena sampah dan tidak berfungsinya saluran drainase kota berdampak apabila musim hujan telah tiba, sampah yang menghambat aliran air meluap ke jalan dan menimbulkan genangan setelahnya. Manajemen permasalahan pemukiman yang buruk dan lingkungan kumuh merupakan refleksi setiap daerah/kota bahwa sedang dalam proses tidak berkelanjutan. Fungsi lingkungan hidup yang rusak atau hilang, tercemar, itu merupakan acaman terhadap prinsip-prinsip pembangunan yang mengacu kepada *sustainable development* sekaligus merupakan bukti bahwa pembangunan masih tergolong rendah menyangkut pembangunan yang selaras antara kebersihan dan keindahan kota.

Oleh karena itu pemerintah saat ini sudah menyadari akan pentingnya RTH dan penanaman pohon, serta pelestarian daerah resapan dan konservasi air. Namun upaya itu saja jelas tidak memadai, daerah/kota harus berkembang terus secara berkelanjutan. Salah satunya melalui saling kebergantungan dan saling mendukung secara resiprokal antara elemen alam dan elemen buatan manusia. Diperlukan regulasi yang dapat melandasi terselenggaranya KRP yang berperspektif kepada lingkungan hidup. Konteks Pemerintahan Kota Blitar melalui Badan Lingkungan Hidup yang bersumber dari UU 32 Tahun, 2009 Pasal 15, mengamanatkan KLHS¹ sebagai kajian keberlanjutan, umumnya dilakukan dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip yang tercermin dalam KLHS kedalam analisis KRP. KLHS dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat.

¹ KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP).

Keberagaman cara melaksanakan setiap rangkaian proses-proses tersebut di atas menyebabkan rincian pelaksanaan KLHS tidak dapat dibakukan dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti misal di Kota Blitar yang memiliki persoalan berbeda dengan daerah lain.

Persoalan-persoalan lingkungan di Kota Blitar seperti dijelaskan di latarbelakang diantaranya alih fungsi lahan, belum optimalnya pembangunan RTH yang ternyata tidak berbanding lurus dengan penghargaan Anuegrah Adipura, dan masih terdapat isu-isu lingkungan yang segera diselesaikan. Selanjutnya untuk membatasi persoalan pembangunan lingkungan, ada 3 (tiga) pembahasan, diantaranya²:

a. Isu lingkungan di bidang ekonomi

Dalam isu ini terdapat isu sampah, isu RTH, limbah, air bersih, dan sanitasi. Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan di Kota Blitar. Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit.

Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan

² Di dalam RPJMD 2016 Kota Blitar terapat berbagai persoalan atau isu sesuai pengelompokan bidang. Seperti contoh untuk isu lingkungan hidup, maka ada beberapa isu diantaranya isu lingkungan di bidang ekonomi, isu lingkungan di bidang pemerintahan dan isu lingkungan di bidang sosial budaya.

konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang

Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan

bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.

Selanjutnya isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan

pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep *Zero Waste*.

Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain:(1)pemenuhan rasio

ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah

penduduk;(2) penanganan Tempat Pembuangan Akhir efektif; (3)Pengelolaan

sampah berbasis 3R (*Reduce, reuse, recycle*) belum maksimal dilakukan di

kawasan pemukiman; (4) progam kampung iklim dan progam pro lingkungan

seperti *Car Free Day* setiap Hari Minggu.

b. Isu lingkungan dari bidang Pemerintahan Umum.

Dari ranah Isu Regulasi, perlu penegasan Implementasi Kebijakan tata

ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban, dan

kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian isu

Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan

wujud pemenuhan hak asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser

paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan mitigasi

bencana.

c. Isu lingkungan dari bidang sosial budaya

Perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan

sehat. Misalnya: gerakan membuang sampah pada tempat yang tepat,

membuang limbah pada tempat yang tepat sampai implementasi pendidikan kesehatan lingkungan ke sekolah.

5.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Manusia

Indikator pertama dalam konsep *sustainable development* adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia secara umum bersifat primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan tersebut meliputi aspek materi dan non-materi.

a. Kebutuhan Materi

Berkaitannya dengan *sustainable development* dalam pembangunan lingkungan di Kota Blitar. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Blitar terdapat beberapa kendala yang harus dituntaskan. *Pertama*, persoalan jumlah penduduk. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Perencanaan Prasarana RTRW Bapedda Kota Blitar³:

“Permasalahan laten yang ada di Kota Blitar terdapat 2 permasalahan. Pertama, masalah pemukiman. Yang menyebabkan kawasan kumuh. Kedua, pembangunan perumahan di lahan pertanian di Jalan Mahakam.”

Masalah pemukiman menyangkut dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bersinggungan dengan pemukiman di Kota Blitar. Jumlah penduduk menjadi isu yang telah lama menjadi isu penting, seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas kependudukan, perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Kota Blitar dan pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks,

³Wawancara dengan Ir Herlyn Krisnawati selaku Kepala Prasarana RTRW Bapedda Kota Blitar pada Tanggal 22 November 2016

dan berbanding lurus dengan berbagai persoalan yang kompleks pula, semisal kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial dan sebagainya. Di bawah ini tabel jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun 2010-2014.

Tabel 5.3

Jumlah Penduduk Kota Blitar 2010-2014

| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|----|-------|-----------------|
| 1. | 2010 | 132.383 |
| 2. | 2011 | 133.492 |
| 3. | 2012 | 134.723 |
| 4. | 2013 | 135.702 |
| 5. | 2014 | 136.903 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2017.

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan setiap tahun, yang kemudian berdampak pada penyediaan lahan untuk tempat tinggal/tempat hunian. Seperti misal di Kelurahan Sukorejo yang menjadi wilayah termiskin di Kota Blitar⁴. Lebih lanjut banyak warga Sukorejo berada di bantaran sungai dan masyarakat dengan kelas ekonomi kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

Seperti yang dikatakan Kepala Dinas dan Tenaga Kerja⁵, bahwa:

“Ada dua lingkungan di Kelurahan Sukorejo, yakni di sekitar bantaran kali lahar Sukorejo dan warga di Balapan menjadi daerah dengan kondisi ekonomi sangat rendah jika dibanding daerah lain di kota Blitar lainnya. Masyarakat di dua daerah itu tidak sama dengan masyarakat lain di Kota Blitar, di dua daerah ini masyarakatnya sangat miskin”.

Padatnya pemukiman ini menimbulkan terbentuknya kawasan kumuh. Seperti di pemukiman di belakang Pasar Legi, yang secara letak masih berada dalam

⁴ Di akses melalui <https://www.timesindonesia.co.id/baca/108883/20151119/142302/kelurahan-ini-masuk-daerah-termiskin-di-kota-blitar/> pada hari Rabu, 9 September 2017.

⁵ *Ibid.*

Kelurahan Sukorejo. Pembangunan rumah berhimpit sampai tidak ada jarak.

Bahkan tidak ada yang mempunyai teras, ada yang terasnya dijadikan sebagai kandang ayam.

Masalah *kedua* yaitu pembangunan perumahan di kawasan pertanian yang membat lahan pertanian yang ada di tepi Kota Blitar tepatnya di sepanjang Jalan Mahakam dari ujung barat sampai ujung timur. Alhasil perumahan-perumahan tersebut tidak teratur. Maka dari itu pemerintah Kota Blitar dalam mengatasi masalah pembangunan harus memiliki peraturan untuk mengendalikan pembangunan yang mana telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Blitar. Namun materinya masih bersifat umum dan konseptual yang belum dapat dijadikan dasar menyangkut pembangunan di Kota Blitar. Lain sisi diperlukan peraturan yang lebih terperinci setiap zona kawasan pembangunan di Kota Blitar yaitu dengan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sangat berperan penting dalam pengendalian penataan ruang. Fungsinya sebagai perangkat pengendalian pembangunan dan memberi batasan pembangunan.

Selain salah satu sebab meningkatnya jumlah penduduk, kemudian kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat pula, sehingga berdampak pada lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas pertanian Daerah Kota Blitar telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun sebanyak 51 ha selama periode dari tahun ke tahun selama 7 tahun yaitu 4,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejumlah 26 ha dan yang terkecil tidak terjadi mutasi lahan. Grafik dibawah ini dapat diketahui perubahan lahan pertanian pada tahun 2008 sampai 2011.

Grafik 5.1

Perubahan Lahan Pertanian (Ha)



Sumber : SLHD Kota Blitar,2016

Grafik di atas menjelaskan adanya penurunan lahan pertanian yang ada di Kota Blitar. Solusi dari perubahan lahan diatas untuk memenuhi kebijakan lingkungan untuk membuat RTH publik yakni dengan membuat hutan kota/tanaman kota, membuat Perda RTH dan rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas.

Ketiga, persoalan Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau di Kota Blitar sendiri tersebar di seluruh wilayah Kota Blitar. Ruang terbuka hijau terdiri atas taman kota, dan median jalan, lapangan, makam, tempat rekreasi, sawah perkotaan, dan sebagainya. Berikut data mengenai ruang terbuka hijau di Kota Blitar:

Tabel 5.1
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar

| No | Lokasi | Luas (Ha) |
|---|-------------------------------|-----------------|
| RTH PUBLIK | | 649.3601 |
| 1. RTH PADA JALUR JALAN KOTA | | 0.1125 |
| 1. | Pot JL. Ir Soekarno 50 Set | 0.0025 |
| 2. | Taman Sepanjang JL Soedanco | 0.0800 |
| 3. | Taman Sepanjang JL JA Suprpto | 0.0250 |
| 4. | Pot Almanda JL S. Parman | 0.0050 |
| 2. RTH TAMAN PERSIMPANGAN JALAN, MONUMEN | | 0.0964 |



| | | |
|-----------|---|----------------|
| 5. | Pulau jalan di perempatan BRI | 0.0023 |
| 6. | Pulau jalan di took sumber waras | 0.0023 |
| 7. | Pulau jalan di perempatan toko sidomulyo | 0.0023 |
| 8. | Pulau jalan di perempatan toko ijo | 0.0006 |
| 9. | Taman perempatan bok ireng | 0.0007 |
| 10. | Pot bis beton perempatan lovi sejumlah 24 pot | 0.0019 |
| 11. | Taman batas sanankulon | 0.0120 |
| 12. | Batas kota rembang | 0.0036 |
| 13. | Taman perempatan plosokerep | 0.0036 |
| 14. | Taman pulau timur stadion | 0.0028 |
| 15. | Taman tugu wahana JL Jend Sudirman | 0.0005 |
| 16. | Taman halaman peta Supriyadi | 0.0120 |
| 17. | Taman tugu pancasila | 0.0120 |
| 18. | Taman pintu masuk JL. S Parman | 0.0375 |
| 19. | Taman patung Ir Soekarno | 0.0025 |
| 3. | RTH TAMAN | 6.5395 |
| 20. | Taman selatan penjara | 0.0038 |
| 21. | Taman selatan es mini 1 | 0.0014 |
| 22. | Taman tugu adipura JL Mawar | 0.0015 |
| 23. | Taman patung koi sangut | 0.0040 |
| 24. | Taman timur jembatan sangut | 0.0005 |
| 25. | Taman pojok stadion 4 unit | 0.0040 |
| 26. | Bak taman depan stadion | 0.0200 |
| 27. | Taman barat pos polisi pleret | 0.0020 |
| 28. | Bak taman depan stadion | 0.0015 |
| 29. | Taman timur SPBU gedog | 0.0008 |
| 30. | Taman selatan SPBU Kebon rojo | 0.0015 |
| 31. | Pot Alamanda lapangan Sananwetan 25 Buah | 0.0035 |
| 32. | Taman TMP suprijadi | 0.0200 |
| 33. | Taman kantor KLH | 0.0750 |
| 34. | Taman Aloon aloon | 3.4000 |
| 35. | Taman di Lingkungan Sekolah | 3.0000 |
| 4. | RTH LAPANGAN OLAHRAGA DAN MAKAM | 56.2570 |
| 36. | Makam Kota Blitar (tersebar) | 22.2270 |
| 37. | Komplek makam bungkarno | 1.6000 |
| 38. | Lapangan kota/kecamatan/kelurahan (tersebar) | 26.4300 |
| 39. | Lapangan sekolah | 2.0000 |
| 40. | Stadion | 4.0000 |
| 5. | RTH HUTAN KOTA DAN KEBUN BIBIT | 9.3200 |
| 41. | Hutan kota kebon rojo | 2.9100 |
| 42. | Agrowisata Blimbing | 5.0000 |
| 43. | Hutan kota di tanjungsari | 0.8000 |
| 44. | Hutan kota gedog | 0.3600 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 45. | Hutan kota tanggung | 0.2500 |
| 6. RTH PENGAMAN JALUR KA, SUTT, SUNGAI DAN BUFFER ZONE | | 577.0347 |
| 46. | Taman lintas KA JL. Tanjung | 0.0050 |
| 47. | Buffer KA Double Track | 152.9500 |
| 48. | Buffer SUTT | 40.0000 |
| 49. | Buffer sungai | 163.4700 |
| 50. | Taman Bis beton timur lintas Ka JL. Tanjung | 0.0015 |
| 51. | Kav. Konservasi di TPA | 1.0000 |
| 52. | Konservasi sumur PDAM | 0.5000 |
| 53. | Sumber Mata Air | 75.3982 |
| 7. TANAH BENGKOK BERUPA SAWAH YANG DISEWAKAN | | 123.6400 |
| 8. BATALYON INFANTRI 511 | | 20.0700 |
| 9. KEBUN RAKYAT, TANAMAN LANGKA | | 1.20000 |
| 10. KEBUN BINATANG MINI | | 1.30000 |
| RTH PRIVAT | | 1,309.5040 |
| 1. | Sawah | 1,032.5840 |
| 2. | Lingkungan Pemukiman | 276.9200 |
| Jumlah TOTAL | | 1,958.8641 |
| Wil Perencanaan | | 3,257.2500 |

Sumber: Bappeda Kota Blitar 2016.

Dari tabel di atas, sebagian besar wilayah Kota Blitar berupa kawasan pemukiman (36,96%) dan pertanian (37,94%). Hingga tahun 2015 prosentase Ruang Terbuka Hijau adalah 20,12% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khususnya untuk RTH Publik, pada tahun 2015 mencapai 694.4601 (10,34%) dan RTH Privat mencapai 1.309.5040 (9,78%). Diharapkan pada tahun 2030 akan dapat mencapai 30% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang RTRW.

Keempat, matinya sumber mata air yang ada di Kota Blitar sebanyak 27 buah⁶. Tetapi belakangan ini sudah ada 2 buah yang mati di Kecamatan Sukorejo yakni Kelurahan Pakunden. Penyebabnya cukup beragam, selain karena faktor

⁶ RPJM Kota Blitar Tahun 2016

alam, beberapa diantaranya juga disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Seperti yang dikatakan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar⁷, bahwa:

“Saat ini kondisi air di 5 sumber air itu mulai mengering bahkan ada yang airnya tidak keluar sama sekali karena jika biasanya debit air mencapai 250 meter kibik per detik saat ini hanya 20-100 meter kibik per detik. penyebab air di 5 sumber itu mengering karena banyaknya sampah yang ada di sekitar sumber air termasuk banyaknya pohon besar di sekitar sumber air yang ditebang warga, akibatnya sawah yang mengandalkan air dari 5 sumber air itu untuk irigasi terancam tidak dialiri air dan gagal panen”

Disamping sumber mata air tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah dan pohon-pohon disekitar mata air ditebang dan tidak diganti. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara menanam kembali pohon yang telah ditebang agar mata air di sekitar pohon tetap terjaga. Diantaranya dengan cara⁸:

1. Mempertahankan keberadaan sumber-sumber mata air yang ada
2. Merevitalisasi sumber mata air yang ada
3. Membebaskan areal sempadan mata air dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu berkurangnya sumber mata air
4. Membeli lahan-lahan milik warga yang berada di sekitar sumber mata air

Kelima, pencemaran air sungai. Disini pendidikan lingkungan dan sosialisasi sangat penting karena masih rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat akan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga berdampak menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran air limbah tahu di Sumber Wayuh dan Sumber Jaran Kelurahan Pakunden Kecamatan

Sukerejo karena air limbah tahu langsung dibuang ke sungai. Sedangkan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) yang tersedia belum optimal penggunaannya berdasarkan hasil pengujian, kualitas air sungai Sumber Wayuh dan Sumber Jaran

⁷ Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Blitar Pande Ketut Suryadi.

⁸ Ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Blitar terkait persoalan sumber air. Tercantem pada RPJM 2016.

telah terjadi peningkatan kualitas dari semula IV menjadi kelas III kriteria baku mutu air sesuai PP nomor 82 tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh kandungan

COD, BOD, phospat total dan sulfida telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.⁹Hal ini dapat diatasi dengan solusi sebagai berikut:

1. Mewajibkan setiap pemrakarsa kegiatan/usaha melakukan pengolahan terhadap limbahnya
2. Memberlakukan izin pembuangan limbah cair
3. Pengembangan perumahan terencana oleh *developer*, wajib disediakan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem *off-site*
4. Konservasi air seperti pembuatan sumur resapan dan *ground reservoir* di Kelurahan Ngadirejo
5. Konsep *ecodrainage*

Keenam, persoalan sampah. Masalah sampah ini merupakan masalah yang signifikan di Kota Blitar karena perlu kesadaran dari semua masyarakat.

Timbunan sampah ini setiap penduduk Kota Blitar terus bertambah seiring bertambahnya penduduk Kota Blitar, kemudian sulitnya mencari TPA, karena selama ini TPA berada di wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini yang menjadi persoalan yang segera di kerjakan. Sisi lain ada solusi yang ditawarkan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan di Kota Blitar yakni mengupayakan untuk lokasi pengelolaan sampah menjadi kompos di setiap kecamatan yakni melalui pengolahan sampah tuntas (IPESATU) di Kecamatan Sananwetan. Di bawah ini tabel terkait peningkatan sampah.

Tabel 5.2
Pengelolaan Sampah

| No | Urutan | Capaian Kinerja Tahunan | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Kelembagaan pengelolaan | - | 7 | 7 | 8 | 8 |

⁹Laporan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2016

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | sampah mandiri | | | | | |
| 2 | Berat Sampah Terangkut | 43,6 | 43,90 | 43,95 | 44,35 | 44,55 |
| 3 | Prosentase Berat Sampah Terangkut | 58,07% | 59,08% | 59,59% | 59,73% | 60,00% |
| 4 | Capaian Wilayah Pengelolaan Sampah (%) | 62,50 | 71,00 | 71,00 | 80,00 | 80,00 |

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, 2016.

Tabel di atas di simpulkan bahwa peningkatan sampah setiap tahun di Kota Blitar mengalami peningkatan. Sisi lain timbunan sampah Kota Blitar mencapai 74,25 ton/hari. Dari jumlah tersebut sampah yang terolah: di TPA Ngegong sebesar 60% atau 44,55 ton/hari, sisanya sebagai berikut ¹⁰:

1. Yang terolah di TPST 3 R sebesar 13,47% ata 10 ton/hari
2. Pengomposan dirumah tangga, kantor, sekolah, dan ruang terbuka hijau 4,04 atau 3 ton/hari
3. Yang dikelola bank sampah sebesar 6,64 % atau sebesar 4,93 ton/hari
4. Yang dikelola pelapak / pengepul sebesar 5,39% atau sebesar 4 ton/hari
5. Daur ulang produk kreatif sebesar 4,04% atau sebesar 3 ton/hari
6. Sampah yang belum terlayani dan tertangani sebesar 6,42% atau 4,77 ton/hari

Dari data-data pengelolaan sampah di atas menjadi salah satu Pekerjaan

Rumah Pemerintahan Kota Blitar untuk membuat TPA, minimal perkecamatan.

b. Kebutuhan Non-Materi

Kebutuhan non-materi berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai *part of the process* dalam penyampaian pendapat. Keterlibatan masyarakat akan mampu mempengaruhi kualitas keputusan para pengambil kebijakan. Karena masyarakat merupakan pakar lokal dalam artian lebih

¹⁰ *Ibid.*

memahami kondisi dan lingkungan sekitar. Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah membuat instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis mulai dari hulu sampai hilir yang ditandai dengan UU 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kota Blitar sendiri mengartikan instrumen dari undang-undang tersebut dengan menerbitkan KLHS yang merupakan instrumen untuk menjamin konsep pembangunan yang berkelanjutan agar tetap menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan (*development plan*) dan perencanaan tata ruang (*special plan*), instrument ini diterapkan sejak kebijakan masih dalam perencanaan (Hulu) dan lingkungnya meliputi kebijakan, rencana dan program. KLHS pada prinsipnya adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat melalui keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

KLHS di Kota Blitar sendiri sudah disusun sejak Tahun 2011 namun baru di implementasikan tahun 2015. Kendala dalam implementasi KLHS didapat lantaran masih belum terdapat intrumen yang menjadi patokan dalam penyusunannya hingga turun edaran bersama Menteri dalam Negeri RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Selain itu perlu pengkajian yang utuh menyeluruh dilingkungan Kota Blitar, kendala lain adalah setelah tersusun instrumen KLHS harus diimplementasikan ke dalam RTRW dan RPJMD Kota Blitar, selain itu turunan dari UU 32 Tahun 2009 diwujudkan melalui adanya Peraturan Walikota Blitar (Perwali) Nomor 21 Tahun

2015 tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, batasan peran masyarakat dalam Perwali tersebut meliputi¹¹ :

1. Pengawasan sosial
2. Pemberian saran, Pendapat, usul, keberatan, pengaduan
3. Penyampaian Informasi dan / laporan

Dari Perwali tersebut juga mengakomodasi Kelompok Masyarakat Peduli

Lingkungan Hidup (KMPLH) yang kemudian dikenal dengan Kelompok Peduli

Lingkungan (KPL) menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam pengawasan

lingkungan, terdapat 21 KPL tersebar di 21 kelurahan se-Kota Blitar dengan

agenda rutin berupa pertemuan dengan jajaran Badan Lingkungan Hidup, agenda

pertemuan dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali agenda pembahasan meliputi

update data, evaluasi peran KPL dalam Musrenbang di Kelurahan, informasi

pembuatan biopori dan informasi bank sampah. Pertemuan rutin antara KPL dan

permerintah terkait menjadi angin segar bagi pembangunan lingkungan di Kota

Blitar, seperti yang dikatakan oleh Denny Eko Prisanto selaku Kasubdit

Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kota Blitar¹².

“Kelompok Peduli Lingkungan sebagai mitra pemerintah sangat berperan terhadap lingkungan sekitar. Mereka selalu memperhatikan lingkungan masing-masing. Jika ada temuan permasalahan seperti pencemaran air sungai, udara dan lain-lain akan disampaikan dalam pertemuan rutin, kemudian dibahas dan dicarikan solusinya. Setelah itu mereka berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap pentingnya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam sekitar.”

Sehingga dengan lahirnya Perwali tersebut diharapkan mampu menjadi

acuan bagi semua elemen terkait terutama bagi masyarakat Kota Blitar, sebagai

¹¹ Perwali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 3

¹² Wawancara dengan Denny Eko Prisanto selaku Kasubdit Pengendalian Dampak Lingkungan. Pada tanggal 16 November 2016.

aktor penting keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tercapai lingkungan yang sehat dan kondusif. Pengejawantahan lain dari Perwali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang dianggap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat kepada lingkungan adalah melalui Program Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat dilingkungan kelurahan mereka masing-masing. Kegiatan serupa lainnya juga rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar hal ini tidak lain agar masyarakat kedepannya mampu mandiri dalam menjaga kelestarian alam dimulai dari lingkungan sekitar mereka.

1.1.2 Pemeliharaan Integritas Ekologi

Indikator kedua dari konsep *sustainable development* yakni pemeliharaan lingkungan yang memiliki 2 (dua) indikator konservasi dan mengurangi konsumsi.

a. Konservasi/ Perlindungan Lingkungan

Indikator ini menjelaskan bahwa konservasi memiliki maksud perlindungan lingkungan, baik lingkungan sumber daya maupun ruang yang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumberdaya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Persoalan lingkungan di Kota Blitar ada beberapa persoalan, persoalan yang paling umum di setiap kota adalah persoalan limbah, baik limbah rumah tangga, limbah industri, limbah hotel, limbah rumah sakit ataupun limbah lainnya. Seperti dalam KLHS Kota Blitar Tahun 2016, bahwa ada isu lingkungan yang segera di selesaikan, salah satunya yakni terkait limbah yang mengakibatkan pencemaran pada kualitas air. Kualitas

air pada akhirnya akan berdampak pada keseimbangan alam, salah satu yang terkena dampak adalah masyarakat itu sendiri.

Di Kota Blitar hanya memiliki satu sungai besar yang mengalir dari sisi utara sampai selatan Kota Blitar yaitu sungai Lahar yang hulunya ada di Kabupaten Blitar. Secara umum kondisi air badan air Kota Blitar masih relatif baik¹³. Pemantauan kualitas air badan air rutin dilakukan sejak tahun 2012 pada badan air yang menjadi titik pembuangan dari air limbah industri tahu yaitu sungai sumber wayuh dan sungai sumber jaran serta pertemuan kedua sungai tersebut yaitu kali tempur.

Persoalan lain yang ada di Kota Blitar adalah pengelolaan RTH. Sebagai wilayah perkotaan, ketersediaan lahan Kota Blitar relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini terkait penggunaan lahan.

Tabel 5.3
Penggunaan Lahan Di Kota Blitar

| NO | Uraian Kawasan Lindung | Penggunaan Lahan Tahun 2015 | Prosentase |
|----|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Kawasan Resapan Air | 148 | 4,54% |
| 2. | Kawasan Perlindungan Setempat | 58 | 1,78% |
| 3. | Kawasan Ruang Terbuka Hijau | 655 | 20,12% |

Sumber : Dokumen Bapedda Kota Blitar, 2017

Dari tabel di atas, sebagian besar wilayah Kota Blitar berupa kawasan permukiman (36,96%) dan pertanian (37,94%). Hingga Tahun 2015 prosentase Ruang Terbuka Hijau adalah 20,12% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khusus

¹³ Berdasarkan RPJMD 2016 Kota Blitar.

untuk RTH publik, pada Tahun 2015 mencapai 10,34%. Kemudian Pemkot Blitar pada Tahun 2030 akan dapat mencapai 30% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang RTRW. Hal ini seperti yang dikatakan Kasubdit Pengendalian dampak lingkungan¹⁴, yakni:

“Ketersediaan ruang terbuka hijau tahun 2016 di Kota Blitar kurang 20% karena di Kota Blitar masih mencapai 10,40% dari luas wilayah Kota Blitar. Pada Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2002 tentang Pengelolaan hutan kota dijelaskan sebuah kota harus memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan RTH seperti Taman Pecut akan selesai pada 2017 ”

Di bawah ini salah satu gambar Ruang Terbuka Hijau di Kota Blitar yang letaknya di tengah-tengah kota. Dimana fungsi alun-alun itu sendiri memiliki fungsi jantung kota, kemudian sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kota Blitar, dan juga kegiatan rakyat dalam memperingati hari kemerdekaan

Gambar 5.1
Alun-alun Kota Blitar



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017.

Pemeliharaan lingkungan Kota Blitar tercemir berdasarkan visi dan misi Kota Blitar yang kemudian terlahir kebijakan Aksi Kota Hija, diantaranya¹⁵

¹⁴Wawancara dengan Denny Eko Prisanto selaku Kasubdit Pengendalian Dampak Lingkungan. Pada tanggal 16 November 2016.

¹⁵RTRW 2011-2020. Bappeda Kota Blitar, 2016

(a) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Sarpas Lingkungan pemukiman, (b) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, (c)

Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Implementasi kebijakan Aksi

Kota Hijau (P2KH) Kota Blitar didasarkan pada UU no 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Blitar no 12 tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam dokumen

perencanaan daerah Kota Blitar. Implementasi kebijakan P2KH ini didukung oleh

setiap dinas-dinas yang terkait. Seperti Bappedda, Disnaker, BLH. Berdasarkan

wawancara dengan kasi pemanfatan runag kota¹⁶

“Memang arah pembangunan Kota Blitar dari tahun ke tahun sampai saat ini mewujudkan dan meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. melakukan sosialisasi program Aksi Kota Hijau, penyiapan peta kota hijau, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Kota Blitar.”

Terdapat beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah : (1) Intensitas kegiatan

pembangunan yang semakin meningkat; (2) Populasi penduduk yang semakin

bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih

sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber

daya alam; (3.) Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik

skala kecil, menengah maupun besar; (4.) Masih minimnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan

pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian

masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah; (5.) Masih lemahnya

¹⁶Wawancara dengan Imam Sholikin selaku Kasi Pemanfaatan ruang kota. Pada Tanggal 11 November 2016

penegakan hukum di bidang lingkungan; (6.) Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal¹⁷

Tantangan bagi semua aktor yang terlibat di Kota Blitar yaitu Pemerintah, Satuan Kerja Kepala Daerah, Swasta dan Masyarakat sesuai dengan isu strategis di KLHS, diantaranya: (1). Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik (2.) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air. Tantangan inilah yang menjadi tugas bagi semua aktor agar bisa bekerjasama untuk menuntaskan isu strategis. Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Blitar. *Pertama*, Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Kedua*, Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya. *Ketiga*, Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait. *Keempat*, Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

b. Mengurangi Konsumsi

Dalam rangka mengurangi konsumsi pola konsumsi energi untuk mengurangi pola konsumsi energi yang akan berdampak besar seperti terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Semakin berkembang suatu

¹⁷Renstra Kota Blitar 2016-2021

pertumbuhan penduduk Kota Bliatar yang akan menambah pola konsumsi energi.

Persoalan lingkungan yang dipicu oleh pola konsumsi dalam bentuk pencemaran

dan kemacetan di perkotaan akan memicu keberingasan sosial, sika yang tidak

saling menenggang. Maka yang diperlukan adalah peubahan pola konsumsi

merupakan salah satu pendekatan yang harus dilakukan.

Di Kota Blitar tentunya melalukan pola konsumsi untuk mengurangi

dampak yang tidak diinginkan seperti:

a. Perencanaan dan perancangan kota (*Green Planning and Design*), yang

bertujuan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota

yang lebih sensitif terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi

terhadap perubahan iklim.

b. Pembangunan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*) untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik

kota/kabupaten, dengan target RTH 30%.

c. Komunitas hijau (*Green Community*) yaitu pengembangan jaringan

kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat.

d. Pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (*Green Waste*) yaitu

dengan menerapkan pengelolaan limbah dan sampah hingga

menghasilkan *zero waste*.

e. Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan (*Green*

Transportation) yaitu dengan mendorong warga untuk menggunakan

transportasi publik ramah lingkungan, serta berjalan kaki dan

bersepeda dalam jarak pendek.

- f. Peningkatan kualitas air (*Green Water*) dengan menerapkan konsep *eco-drainase* dan *zero runoff*.
- g. *Green Energy*, yaitu pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.
- h. *Green Building*, yaitu penerapan bangunan hijau yang hemat energi.

Dalam pelaksanaannya Kota Blitar sendiri belum mampu menerapkan atribut Kota Hijau secara keseluruhan.

Program dan kegiatan yang mendukung Kota Hijau di Kota Blitar diarahkan pada pelaksanaan *green planning and design, green water, green waste, green community, green open space*. Program dan kegiatan itu tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2011-2015.

Beberapa cara yang telah dilakukan dengan baik di Kota Blitar diantara yaitu pengurangan pemanasan global dan pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup¹⁸

“Dalam penanganan pemanasan global dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca seperti pada umumnya yang di setiap kota/kabupaten lakukan. Lalu untuk pengelolaan sampah memakai 3R.”

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global. Kemudian Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari

¹⁸Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup. Pada Tanggal 17 November 2016

sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah: mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

5.1.3 Keadilan Sosial

a. Keadilan Masa Kini

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan yang pertama adalah keadilan kini menunjukkan perlunya keadilan dan kesetaraan akses dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian tanpa pemerataan akan menimbulkan ketimpangan. Isu pembangunan tidak lepas dari dari konsep pembangunan berkelanjutan, dimana proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” menjadi sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Selanjutnya muncul isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seiring dengan gagasan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan

hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji oleh berbagai negara di dunia¹⁹.

Konteks pembangunan lingkungan di daerah perkotaan salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 152 juta jiwa (65%)²⁰. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan seperti banjir, kemacetan, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau. Kemudian faktor lain yang memperberat persoalan lingkungan adalah fenomena perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak signifikan terhadap pembangunan perkotaan. Misal dampak yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, penghidupan penduduk, dan penyelamatan asset yang ada. Dampak semakin parah dirasakan oleh kaum miskin. Perubahan iklim secara langsung menimbulkan cuaca ekstrem yang mengakibatkan kekeringan amat sangat di musim kemarau sekaligus di musim penghujan yang curah hujan sangat tinggi.

Dari fenomena perubahan iklim yang ekstrem, Pemerintah Indonesia mengambil langkah yakni mitigasi untuk mengurangi efek rumah kaca, akan tetapi masyarakat perkotaan lebih rentan terhadap fenomena perubahan iklim.

¹⁹ Mohammad Mulyadi Tri Rini Puji Lestari, dkk. *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: DIMENSI SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN*. 2015. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Hlm.3

²⁰ Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPN) 2010 – 2025*, (Jakarta: Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, 2010), p.1.

Saat ini banyak fokus program dan inisiatif yang lebih mengarah pada upaya adaptasi. Upaya adaptasi dalam skala kota serta membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dirasa juga perlu dilakukan. Ada beberapa program yang dikembangkan oleh pihak ketiga dalam rangka perubahan iklim, seperti *The Asian Cities Climate Resilience Network* (ACCRN), *GIZ-PAKLIM - Policy Advice for Environment and Climate, Climate Resilience Cities* (CRC), dan *The Stakeholders Coordination, Advocacy, Linkages and Engagement for Resilience* (Scale-R)²¹. Selain itu juga ada program dari pemerintah pusat, yaitu Program Kampung Iklim²².

Kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun menjadi alasan terbentuknya Program Kampung Iklim. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, kapasitas aparatur pemerintah relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan perkotaan yang harus dihadapi, antara lain peraturan, pendanaan, organisasi, sumber daya manusia, dan keterpaduan perencanaan²³.

Bencana terkait dampak perubahan iklim juga sudah mulai dirasakan masyarakat Kota Blitar. Berdasarkan Analisis Resiko Perubahan Iklim Kota

²¹ *Op. Cit.* hlm.181.

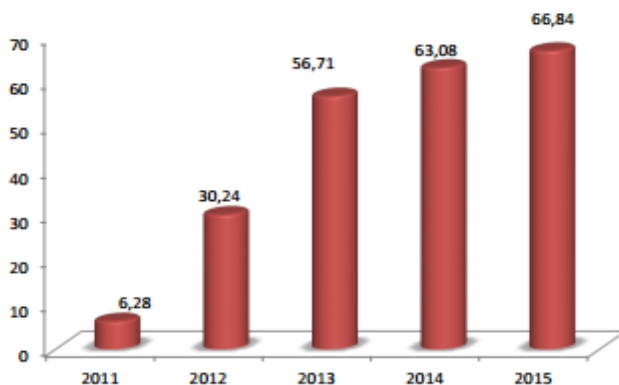
²² Program ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2010. Di Kota Blitar sendiri Kampung Iklim baru diterapkan pada Bulan April 2013, dan setiap masing-masing daerah program memiliki fokus yang berbeda-beda.

²³ *Op. Cit.* hlm.182.

Blitar, terdapat 5 bahaya yang merupakan dampak dari perubahan iklim Kota Blitar yaitu kekeringan, wabah penyakit yang terkait perubahan iklim. (Diare, ISPA, DBD, Chikungunya, Dipteri), genangan, angin ribut, tanah longsor, dan gagal panen. Pada akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 terjadi genangan air hujan yang frekuensi dan intensitasnya meningkat sehingga cukup aktivitas warga. Gejala keterbatasan air tanah ditunjukkan dengan semakin dalamnya warga kota harus mengebor sumur untuk memperoleh air (hingga 16 meter). Angka kejadian penyakit terutama Dipteri dan DBD meningkat tajam (Gambar2.4). Meskipun jika dibandingkan dengan daerah lain bahaya di atas tidak terlalu ekstrim (karena Kota Blitar tidak terletak di coastal area), tetapi kondisi ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor infrastruktur dan kesehatan di Kota Blitar.

Diagram 5.1

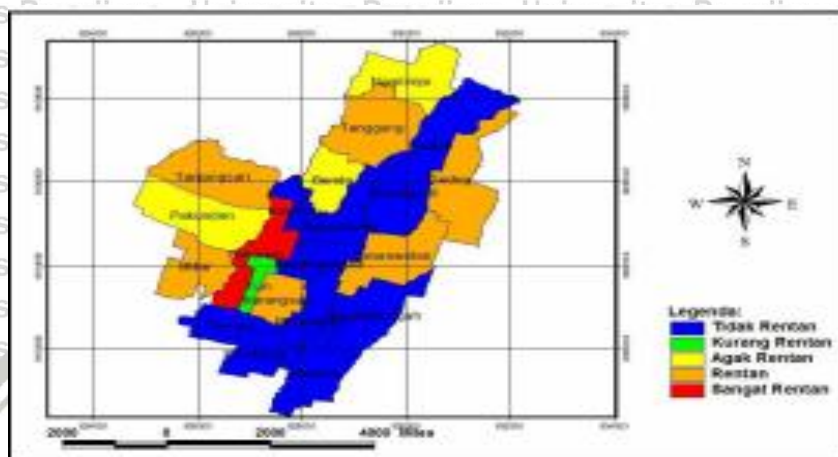
Angka Kejadian DBD per-1000 Kota Blitar Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2016.

Gambar 5.2

Peta Perubahan Iklim Kota Blitar

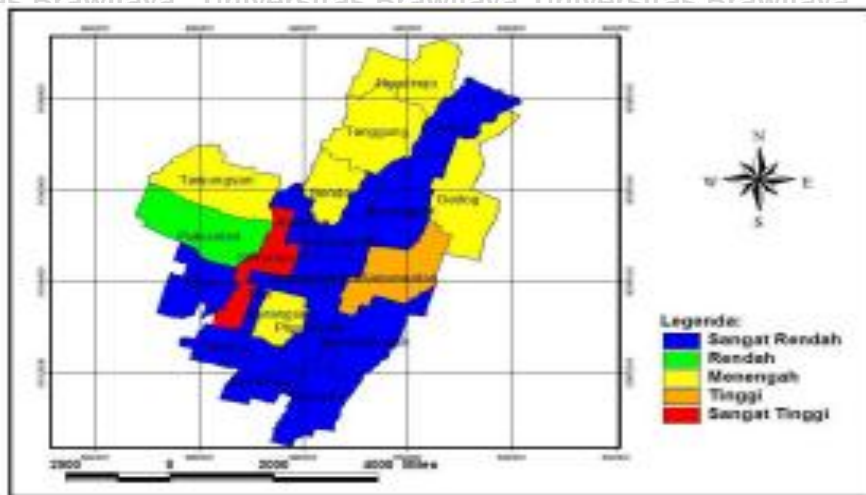


Sumber: Kajian Resiko Iklim Kota Blitar, 2016

Berdasarkan peta di atas, terdapat 6 kelurahan yang kondisinya agak bahaya karena mengalami dampak perubahan iklim. Dilihat dari aspek kerentanan (Gambar 2.6), satu kelurahan yaitu Kelurahan Sukorejo merupakan kelurahan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, sedangkan kelurahan lainnya bervariasi dari kurang rentan hingga tidak rentan. Untuk risiko iklim (Gambar 2.7) sebagian besar kelurahan di Kota Blitar memiliki tingkat risiko yang rendah dan menengah, kecuali untuk Kelurahan Sukorejo, risikonya sangat tinggi.

Hal ini disebabkan karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan jumlah rumah tangga miskin yang lebih besar daripada kelurahan lainnya.

Gambar 5.3
Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kota Blitar



Sumber: Kajian Risiko Perubahan Iklim Kota Blitar, 2016.

Di Kota Blitar dalam merespon perubahan iklim atau dalam pembangunan lingkungan selain dengan menerapkan Program Kampung Iklim yang secara kebijakan bersifat *Top Down*, ada cara lain yakni dengan menerapkan pengelolaan sampah menjadi kompos di setiap kecamatan atau pengolahan sampah tuntas (IPESATU) yang terletak di Kecamatan Sananwetan. TPA yang jauh berada di Kabupaten Blitar ini menjadi alasan bahwasanya sampah belum ditangani secara maksimal. Maka dari itu perlunya kesediaan lahan untuk tempat pengolahan sampah agar tidak berakibat fatal. Hal ini diperjelas oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

“Masalah sampah ini merupakan masalah yang signifikan di Kota Blitar karena perlu kesadaran dari semua masyarakat. Timbunan sampah ini setiap penduduk Kota Blitar terus bertambah seiring bertambahnya penduduk Kota Blitar”

Dari penjelasan di atas mengisyaratkan secara tersurat bahwa persoalan lingkungan yang belum optimal salah satunya adalah belum tersedianya TPA di Kota Blitar.

Persoalan lain dalam hal keadilan masa kini yakni pemerataan pembangunan. Konteks ini di Kota Blitar dalam hal pembangunan lingkungan, maka perencanaan wilayah perlu diperbaiki agar tidak terjadi alih fungsi lahan.

Sebagai wilayah perkotaan yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil (32,58 km²), lahan yang ada di Kota Blitar sebagian besar adalah lahan non pertanian.

Dengan luas baku sawah Kota Blitar ± 1.000 ha, maka sebagian besar lahan yang dimiliki penduduk adalah lahan untuk permukiman dan perdagangan barang/jasa²⁴. Hal ini juga ditunjukkan oleh sebagian besar pekerjaan penduduk

Kota Blitar adalah di luar sektor pertanian. Jika ada yang memiliki lahan pertanian, luasnya relatif kecil dan ada juga petani Kota Blitar yang memiliki lahan di luar

wilayah Kota Blitar (Kabupaten Blitar dan sekitarnya). Seiring dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan kota, alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian (budidaya) semakin meningkat terutama untuk permukiman dan perdagangan barang/jasa. Lahan pertanian yang ada yang berdasarkan RTRW

Kota Blitar 2010-2030 merupakan salah satu bentuk ruang terbuka (RTNH-Ruang Terbuka Non Hijau) sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan lahan tersebut dan menjadikannya Ruang Terbuka Hijau salah satunya melalui Peraturan Daerah LP2B²⁵.

²⁴ RPJMD Kota Blitar 2016.

²⁵ *Ibid.*

Pengembangan wilayah dalam bentuk penambahan luasan wilayah sudah tidak memungkinkan. Namun demikian, potensi pengembangan wilayah bagi Kota Blitar dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun industri pengolahan, akan menimbulkan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lainnya²⁶. Karena keterbatasan lahan, Kota Blitar tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Penggerak ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan wisata dan kawasan perdagangan barang dan jasa. Potensi pengembangan wisata Kota Blitar relatif besar dengan keberadaan Makam Bung Karno sebagai *icon* wisata Kota Blitar. Setiap tahun banyak wisatawan yang mengunjungi Kota Blitar terutama untuk mengunjungi makam Bung Karno. Perkembangan jumlah wisatawan Kota Blitar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

²⁶ *Ibid.*

Tabel 5.4

**Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Kota Blitar Tahun 2011-2015**

| No | Objek Wisata | Jumlah Wisatawan Pertahun | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Makam Bung Karno | 505.318 | 662.599 | 819.239 | 931.858 | 890.966 |
| 2. | Perpustakaan Bung Karno | 535.041 | 552.248 | 761.286 | 810.698 | 899.875 |
| 3. | Sumber Udel | 81.000 | 67.783 | 70.371 | 65.136 | 75.776 |
| 4. | Pemandian Herlingga Jaya | 79.106 | 71.175 | 154.353 | 73.481 | 71.148 |
| 5. | Istana Gebang | - | 1.211.680 | 292.142 | 381.292 | 463.028 |
| Jumlah | | 1.200.465 | 2.565.485 | 2.097.391 | 2.162.455 | 2.400.791 |

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kota Blitar diantaranya Makam Bung Karno, Perpustakaan Proklamator, Istana Gebang, Waterpark Sumber Udel dan Pemandian Herlingga Jaya mengalami kenaikan dari 1.200.465 pengunjung di tahun 2011 meningkat menjadi 2.162.455 pengunjung di tahun 2015.

Berdasarkan potensi di atas, maka di RTRW Kota Blitar 2010-2030, kawasan wisata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis. Ada 3 kawasan strategis yang akan dikembangkan meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategi aspek lingkungan.

Khusus kawasan strategis sosial budaya terdiri dari kawasan wisata Makam Bung Karno dan Kawasan Wisata Perjuangan PETA.

a. Keadilan Masa Depan

Keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antara generasi dengan menghargai keberagaman budaya dan kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan atas sumberdaya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

Pembangunan lingkungan di Kota Blitar salah satu misinya²⁷ adalah memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi daerah yang didukung oleh aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik²⁸.

Dengan visi tersebut bisa diartikan bahwa pembangunan lingkungan di Kota Blitar secara umum memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di pembangunan berkelanjutan yang salah satu indikatornya adalah persoalan lingkungan. Melihat arah pembangunan Kota Blitar yang mengadopsi nilai-nilai

²⁷ Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berdasarkan kepada makna visi kota yang telah ditetapkan. Misi Kota Blitar periode 2011-2015, diantaranya mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berketuhanan yang maha esa, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata, memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, dan terakhir memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah.

²⁸ Di akses melalui portal.blitar.go.id/index/.web.php?p.profil&id=8 pada tanggal 10 September 2019.

dari *sustainable development*, bisa dilihat dari kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)²⁹.

Implementasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu 2011 - 2015 merujuk pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pengganti UU 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang – Undang Lingkungan yang baru tersebut mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 5.5

Tabel 5.5

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2011-2015

| No | Urutan | Capaian Kinerja Pertahun | | | | |
|----|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Kelembagaan pengelolaan sampah mandiri | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | Berat Sampah Terangkut | 43,6 | 43,90 | 43,95 | 44,35 | 44,55 |
| 3 | Prosentase Berat Sampah Terangkut | 58,07% | 59,08% | 59,59% | 59,73% | 60,00% |
| 4 | Capaian Wilayah Pengelolaan Sampah (%) | 62,50 | 71,00 | 71,00 | 80,00 | 80,00 |

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, 2016.

²⁹ Berdasarkan RPJMD Kota Blitar TAHUN 2016-2021, yang di dalamnya memuat aspek pelayanan umum, kemudian di fokuskan menjadi non pelayanan dasar (lingkungan hidup).



Tabel di atas di simpulkan bahwa peningkatan sampah setiap tahun di Kota Blitar mengalami peningkatan. Sisi lain timbunan sampah Kota Blitar mencapai 74,25 ton/hari. Dari jumlah tersebut sampah yang terolah: di TPA Ngegong sebesar 60% atau 44,55 ton/hari, sisanya sebagai berikut³⁰:

1. Yang terolah di TPST 3 R sebesar 13,47% ata 10 ton/hari
2. Pengomposan dirumah tangga, kantor, sekolah, dan ruang terbuka hijau 4,04 atau 3 ton/hari
3. Yang dikelola bank sampah sebesar 6,64 % atau sebesar 4,93 ton/hari
4. Yang dikelola pelapak / pengepul sebesar 5,39% atau sebesar 4 ton/hari
5. Daur ulang produk kreatif sebesar 4,04% atau sebesar 3 ton/hari
6. Sampah yang belum terlayani dan tertangani sebesar 6,42% atau 4,77 ton/hari

Data dan informasi lingkungan yang bisa di akses publik terdiri dari beberapa jenis diantaranya : Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dapat diakses di website Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar di alamat www.blh.blitarkota.go.id, buku Profil Lingkungan Hidup, Video publikasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil pemantauan kualitas udara di Kota Blitar yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2011 - 2015 diketahui bahwa kualitas udara di Kota Blitar masih memenuhi baku mutu (tidak melebihi Ambang Atas).

Tabel 5.6

Capaian Kulitias Udara di Kota Blitar Tahun 2011-2015

| NO | Kandungan Udara | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ambang Batas |
|----|-----------------|------|------|---------|-------|-------|--------------|
| 1. | Sulfur Dioksida | 0,34 | 1,11 | <2,1484 | 1,02 | 13,7 | 900 |
| 2. | Karbon | <LD | <LD | 1 mg/ | 1 mg/ | 1 mg/ | 1 mg/ m3 |

³⁰ Ibid.



| | Monoksida | | | m ³ | m ³ | m ³ | |
|----|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 3. | Nitrogen Dioksida | 1 Nm ³ | 2,9 Nm ³ | 11,389 Nm ³ | 15,672 Nm ³ | 9,22 Nm ³ | 400 Nm ³ |
| 4. | Hidro Sulfida | <LD | 0,0001 Ppm | 0,00025 Ppm | 0,0002 5 ppm | - | - |
| 5. | Timah Hitam | <LD | 0,0001m mg/Nm ³ | 0,0020 mg/Nm ³ | 0,0197 mg/Nm ³ | 0,0194 mg/Nm ³ | - |
| 6. | Partikel Debu | 0,023 mg/m ³ | 0,07 mg/m ³ | 0,0203 mg/m ³ | 0,7564 mg/m ³ | 0,7564 mg/m ³ | - |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, 2016.

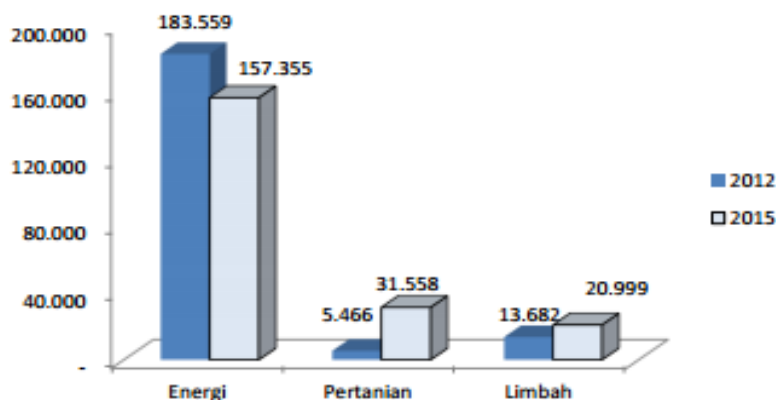
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menunjukkan pencapaian kinerja di bidang lingkungan Hidup dengan melihat pada 3 (tiga) parameter yaitu:

1. Indeks pengendalian pencemaran air
2. Indeks pengendalian pencemaran udara
3. Indeks tutupan vegetasi

Kemudian sudah dilakukan sampai tahun 2015 adalah pemantauan kualitas air dan udara serta pembinaan terhadap aktifitas penghasil limbah serta adanya peningkatan area untuk RTH. Nilai IKLH Kota Blitar baru bisa dihitung tahun 2015 dikarenakan tahun sebelumnya data yang ada tidak mencukupi. Nilai IKLH Kota Blitar tahun 2015 adalah 57,94.

Diagram 5.2

Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Blitar 2011-2015



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, 2016.

Keadilan masa depan akan tercapai ketika *stakeholder* saling bekerjasama, yaitu, pemerintah Kota Blitar selaku pembuat kebijakan, pihak swasta, dan terlebih adalah keikutsertaan masyarakat. masyarakat pemerhati lingkungan, instansi penangananan lingkungan dan juga CSR. Kesadaran dalam pengelolaan dan penggunaan secara bijak menjadi penting bagi setiap masyarakat. Lingkungan yang akan dinikmati anak cucu di masa depan. Maka dari itu pendidikan lingkungan diberikan di bangku sekolah di setiap Kota Blitar.

5.1.4 Kesempatan Menentukan Nasib Sendiri

Indikator selanjutnya dalam konsep *sustainable development* adalah kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*). Indikator ini memiliki dua prinsip, diantaranya:



a. Masyarakat Mandiri

Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas dasar hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk alokasi sumberdaya alam.

Pembangunan lingkungan di Kota Blitar, secara tidak langsung yang bermain dalam hal pembangunan khususnya lingkungan adalah pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan yang mengambil keputusan kebijakan adalah pemerintah itu sendiri, semisal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, kemudian melalui KLHS, yang selanjutnya diterjemahkan melalui RTRW dan diperkuat dengan peraturan daerah atau peraturan walikota/bupati. Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada pembahasan indikator ke 1 tentang kebutuhan non-materi pemerintah Kota Blitar memberikan stimulan pada pada masyarakatnya melalui Perwali No 21 Tahun 2015 tentang Peran Serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa peran masyarakat terbagi menjadi dua, diantaranya peran individu masyarakat dan peran kelompok masyarakat. Peran individu masyarakat berbentuk keikutsertaan pada pengawasan, pengaduan dan penyampaian atau memperoleh informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan peran kelompok masyarakat berbentuk keikutsertaan pada RPPLH, KLHS, Amdal dan izin lingkungan, sistem informasi

lingkungan hidup secara terpadu dan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup (KMPLH)³¹.

Peran masyarakat Kota Blitar dalam pembangunan lingkungan selain kesadaran individu setiap masyarakat, sisi lain yang menjadi landasan dalam keikutsertaan masyarakat menjaga lingkungan yakni melalui RPPLH³². Dalam RPPLH masyarakat menyampaikan dan memperoleh informasi mengenai status lingkungan hidup dan transportasi perizinan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program Kampung Iklim masyarakat di Kota Blitar pun dilibatkan atau ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi, yang memperhatikan kearifan lokal dan mencangkup serangkaian kegiatan perencanaan sosialisasi, fasilitas, pengawasan, evaluasi dan penilaian.

Kota Blitar secara kualitas udara bagus, seperti disinggung pada pembahasan di atas, tetapi untuk pencemaran polusi udara akibat dari aktivitas industri rumah tangga tidak dapat dihindari, walaupun masih tergolong kecil, seperti contohnya di Kelurahan Pekunden yang terletak di Kecamatan Sukerejo, contoh memiliki berbagai macam masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri rumah tangga tahu dan tempe, dan aktivitas peternakan. Santasi yang tidak baik kemudian menambah pencemaran lingkungan. Dengan dilatarbelakangi permasalahan lingkungan tersebut maka terpilihlah Kelurahan Kapunden menjadi salah satu daerah percontohan untuk

³¹ Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Di akan setahun sekali pada Musrebang RPJMD.

proklamasi untuk tahun 2011 ini. Di dalam rencana kerja proklamasi ini ada beberapa langkah yang bertujuan mewujudkan Kelurahan Pakunden yang ramah lingkungan. Diawali dengan pembangunan talud untuk perlindungan Mata Air Sumberwayuh dan Sumberjeran, kemudian dilakukan pula pembangunan tempat pengolahan limbah tahu akhir di aliran Sumberwayuh, program bakti sosial pembersihan sungai, sampai dengan penanaman bibit pohon rambutan, bibit suren, dan bibit buah kelengkeng.

Selanjutnya untuk memperbaiki sistem sanitasi, masyarakat diberikan bantuan berupa pembagian gerobak di masing-masing RW, tong sampah, pembangunan tempat pengolahan akhir tahu, perlindungan mata air, dan penghijauan kota. Diharapkan kegiatan proklamasi ini dapat berjalan optimal, sesuai dengan rencana dan target, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daerah yang berhasil menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, kegiatan ini dapat dikatakan sebagai wujud pembangunan berkelanjutan Kota Blitar yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan di dalam kegiatan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Kota Blitar yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah kota memiliki beberapa tantangan dan target yang hendaknya dapat diwujudkan, yaitu peningkatan pelayanan sanitasi, pemantapan sistem lingkungan yang aman, lestari, dengan mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang saat ini telah tertuang di dalam Raperda RTRW Kota Blitar.

Selain melibatkan masyarakat setempat, tidak menutup kemungkinan pemerintah

kota untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka mewujudkan

Kota Blitar yang lestari pariwisata

b. Partisipasi Demokrasi

Prinsip partisipasi demokrasi memiliki artian adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi demokrasi diharapkan mampu menuai manfaat dari keputusan dan peran yang sudah masyarakat berikan. Pembangunan di Kota Blitar yang melibatkan masyarakat mempunyai potensi yang sangat besar karena pada prinsipnya Kota Blitar menerapkan pembangunan yang partisipatif, dimana pemerintah dalam program dan kebijakan mengutamakan partisipasi masyarakat dan memberikan porsi yang lebih dengan tetap tidak mengesampingkan tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan kemandirian dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungan secara mandiri dengan menciptakan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan serta mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Blitar.

Secara legal formalnya pemerintah Kota Blitar membuat rumusan peran masyarakat yang dapat berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan. Dalam penyusunan kebijakan penataan ruang berdasarkan RTRW Kota Blitar Tahun 2011-2030 terbagi menjadi tiga aspek meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam

mengakomodasi peran masyarakat dalam merumuskan kebijakan RTRW Pasal 107 ayat (1) huruf a tentang Perencanaan Tata Ruang, RTRW dengan spesifik menjelaskan partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam perencanaan tata ruang³³:

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang
5. Penetapan rencana tata ruang.

Agar terwujud partisipasi yang ideal maka, diperlukan sarana yang mampu memwadahi seluruh partisipasi dan apresiasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tata ruang. Dimensi dari peran masyarakat kemudian diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RW dilaksanakan setiap minggu ke II bulan januari, Kelurahan diadakan pada minggu III-IV bulan januari, Kecamatan diadakan minggu ke II bulan februari, dan Musrenbang ditingkat Kota dimulai dengan forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), kemudian berlanjut ke Musrenbang RKPD Kota Blitar yang melibatkan seluruh SKPD, tokoh masyarakat, LSM dan perguruan tinggi yang dilaksanakan pada minggu III bulan maret. Pelaksanaan Musrenbang selama ini mendapatkan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Blitar. Monev rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, mencakup aspek kebijakan (kesesuaian dokumen perencanaan) maupun aspek hasil realisasi

³³ Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030.

pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Money Bappeda Musrenbang di Kota Blitar dapat dilihat sebagai berikut³⁴:

Tabel 5.7

Perkembangan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015

| No. | Urutan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Ketersediaan Dokumen Perencanaan | Lengkap | Lengkap | Lengkap | Lengkap | Lengkap |
| 2. | Pelaksanaan Musrenbang | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |

Sumber : Dokumen Bapedda Kota Blitar, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan jika kegiatan Musrenbang di Kota Blitar rentang waktu 2011 – 2015 mampu terlaksana, menunjukkan jika partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Blitar cukup tinggi. Namun peningkatan partisipasi masyarakat dan forum-forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan masih perlu ditingkatkan baik berupa akses maupun ruanglingkupnya. Masyarakat juga harus melakukan pengawasan terhadap pembuatan Undang-undang, Rencana Undang-undang dan produk hukum lain yang mencakup lingkungan hidup.

³⁴ Ibid.

BAB VI

PENUTUP

Setelah penjabaran pada bab-bab sebelumnya atas pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti pada rumusan masalah, maka bab ini akan menjadi penutup dari pemaparan hasil penelitian ataupun ketika proses penelitian berlangsung. Di sisi lain, peneliti juga memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sekaligus bagi peneliti kedepannya. Kesimpulan yang terdapat pada bab ini merupakan jawaban atas penggunaan teori pada analisis permasalahan.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari peneliti ini adalah sebagai berikut;

1. Pemenuhan Kebutuhan Manusia

Pemenuhan kebutuhan manusia baik materi maupun nonmateri berdasarkan konsep *sustainable development* oleh Pemerintah Kota Blitar belum sepenuhnya berjalan optimal, terdapat tren positif dalam penyelesaian setiap permasalahan lingkungan yang secara langsung berimplikasi pada permasalahan ekonomi, dan kependudukan. Pendukung terjadinya tren positif ditunjukkan oleh pemerintah Kota Blitar, dikarenakan seluruh aspek terkait termasuk masyarakat mampu berperan aktif selain itu terdapat legal formal yang melandasi setiap keputusan yang diambil. Ini artinya pemenuhan kebutuhan manusia di Kota Blitar sudah mampu mengakomodasi seluruh aspek yang ada.

2. Pemeliharaan Lingkungan

Secara umum Pemerintah Kota Blitar sudah sadar akan pentingnya perlindungan lingkungan. Perwujudan dari kepedulian yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui penyusunan KLHS, selain daripada itu Pemerintah Kota Blitar memahami bahwa tidak hanya regulasi saja yang mampu mengatasi permasalahan lingkungan perlu adanya tindakan lain yang kemudian diterjemahkan melalui pembangunan RTH, walaupun ketersediaan RTH di Kota Blitar masih belum terpenuhi seluas 30%, tentunya semua permasalahan dalam usaha pemeliharaan lingkungan membutuhkan solusi jangka panjang oleh karena itu diperlukan perubahan pola konsumsi beberapa cara yang sudah diterapkan Kota Blitar dalam perubahan pola konsumsi adalah merubah ketergantungan masyarakat pada pola pengolahan emisi gas rumah kaca. Yang perlu digaris bawahi adalah pemrumusan regulasi dan kebijakan oleh pemerintah dan pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat adalah untuk kepentingan bersama menuju Kota Blitar yang berkelanjutan.

3. Keadilan Sosial

Kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan untuk generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mewujudkan keadilan sosial Pemerintah Kota Blitar mampu menerjemahkan dengan baik melalui visi dan misi solusi yang di tawarkan oleh pemerintah salah satunya melalui mitigasi bencana terhadap perubahan iklim yang ditakutkan dapat berdampak

kepada perubahan lingkungan. Masih terdapat 6 (enam) kelurahan yang rawan dampak perubahan iklim, faktor utama dari kerawanan ini adalah kepadatan penduduk sehingga perlu adanya pemerataan pembangunan. Secara garis besar keadilan sosial tercapai apabila terdapat kerjasama antara *stakeholder* dan masyarakat.

4. Kesempatan Menentukan Nasib Sendiri

Dalam indikator ini kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam mendapatkan akses dan kemudahan dilingkungan Kota Blitar. Akses bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut serta membangun Kota Blitar yang lebih baik ditunjukkan oleh pemerintah dengan dilibatkan peran masyarakat melalui KPL yang berada dalam naungan BLH, selain itu pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Perwali Nomor 21 Tahun 2015 sebagai instrument pendukung peran masyarakat dalam membangun lingkungan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi atas beberapa permasalahan yang dapat dijadikan alternatif pembangunan lingkungan yang berorientasi pada sustainable development.

1. Pemenuhan Kebutuhan Materi dan Non Materi

Peraturan yang lebih terperinci setiap zona kawasan pembangunan di Kota Blitar yaitu dengan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sangat berperan penting dalam pengendalian penataan ruang. Fungsinya sebagai perangkat pengendalian

pembangunan dan memberi batasan pembangunan. Kurangnya perhatian pemerintah pada Halte Bus atau angkot yang tidak terawat dan sering kali di jadikan tempat yang tidak semestinya, selain halte di Kota Blitar Tempat umum seperti Terminal dan Stasiun Patria masih kurang RTH sehingga terkesan panas dan kering.

2. Pemeliharaan Lingkungan

Alih fungsi tanah pemerintah bekas bangunan seperti kelurahan menjadi RTH sudah dilakukan, namun tentunya masih kurang jika prosentase RTH ideal adalah 30%. Pemerintah harus lebih massive dalam melakukan pendataan terhadap asset daerah yang tidak digunakan sehingga tidak menjadi semak belukar atau di salah gunakan untuk bangunan-bangunan liar. Perda di Kota Blitar harus konsisten membawa misi *sustainable development* dan disusun berdasarkan KLHS. Untuk menambah persentase RTH Kota Blitar diantaranya Taman Pecut yang saat ini dalam proses pembangunan yang akan selesai pada tahun 2017, Taman Sentul Blitar, Green Park dan Kebon Rojo. Dijelaskan juga pada warta berita Kota Blitar bahwa bangunan yang tidak berfungsi akan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau.

3. Keadilan Sosial

Masalah sampah ini merupakan masalah yang signifikan di Kota Blitar karena perlu kesadaran dari semua masyarakat. Timbunan sampah ini setiap penduduk Kota Blitar terus bertambah seiring bertambahnya penduduk Kota Blitar. Keadilan masa kini yaitu upaya untuk lokasi pengelolaan sampah menjadi

kompos di setiap kecamatan, karena hal sepele ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen di Kota Blitar, sedangkan saat ini pemerintah Kota Blitar telah memiliki pengolahan sampah tuntas (IPESATU) di Kecamatan Sananwetan. TPA yang jauh berda di Kabupaten Blitar ini menjadi alasan bahwasanya sampah belum ditangani secara maksimal. Maka dari itu perlunya kesediaan lahan untuk tempat pengolahan sampah agar tidak berakibat fatal.

4. Masyarakat Mandiri

Perwali tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan mampu menjadi pemantik bagi masyarakat dalam ikut serta membangun lingkungan. Peran masyarakat sangatlah penting karena tanpa ada kesadaran dan peran masyarakat pembangunan berkelanjutan secara umumnya tidak dapat terlaksana, masih diperlukan pendampingan dari pemerintah terkait dan kegiatan agenda-agenda lain yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudharto. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press

James A. Black dan Bean J. Champion. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*, Bandung, CV. Alfabeta, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013

Anthoni J.C dan James C. Snyder. *Perencanaan Kota*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1989

Sudharto P. Hadi. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Jogja. Gajahmada University Press

Fauzi A. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia 2004

Fauzi A. *Rethinking Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam. Artikel dalam Buku Orange Book ; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global*. Bogor. IPB Press. 2009.

Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gajah Mada Press. : Yogyakarta

Gustomy, Mohtar. 2014. *Bahan Bacaan : Teori Pembangunan. Prodi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya. 2014.

Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Dokumen

Buku Rencana Kerja 2011-2020 Bappeda Kota Blitar

Buku Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Buku Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Buku Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

PPID 2015-2025 Kota Blitar

Rencana Tata Ruang Wilaya Kota Blitar Tahun 2011-2030

Buku Rencana Strategis 2011-2020 Kota Blitar

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Blitar 2015

Rencana Aksi Kota Hijau Kota Blitar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengendalian dan
Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penelitian

M. Fani Cahyandito. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekologi, Ekonomi, dan
Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*.2006.

Selvia Rosy Erdha Okta Reza. *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan
Penegelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus pada
badan Lingkungan Hidup Kota Malang)*.2014. Malang. Universitas
Brawijaya.

Susi Lastrika Sinaga. *Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang dalam
Pembangunan Berkelanjutan (studi pada Bappeda Kota Malang)*.2012.
Malang. Universitas Brawijaya

Widi Citra Pribadi Pamungkas Timumun. *Evaluasi Dampak Pembangunan*

*Kawasan Bumiaji Berbasis Agroindustri Menuju Terwujudnya Upaya
Pelestarian Lingkungan Hidup (suatu Kajian Sustainable Development
berwawasan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Batu).*

2012. Depok. Universitas Indonesia.

M Rozikin. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota
Batu.* 2012. Malang. Universitas Brawijaya.

Wawancara

Wawancara dengan Christina Ratnawati, Kepala Divisi Produksi Tanaman Pangan
dan Holtikultural, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar,
19 November 2016 pukul 14.15 di Lobi Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Blitar.

Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub Bidang
Lingkungan Hidup. Bappeda Kota Blitar, Pada Tanggal 17 November
2016 pukul 10.30 di Ruang Tamu Bappeda Kota Blitar

Wawancara dengan Bambang selaku Staff Dinas Kepemudaan, Kebudayaan,
Olahraga dan Parawisata pada Tanggal 24 November 2016 pukul 11.45 di
Ruang Bapak Bambang

Wawancara dengan Ir Herlyn Krisnawati selaku Kepala Prasarana RTRW
Bappeda Kota Blitar pada Tanggal 22 November 2016 pukul 10.45 di
Ruang Lobi Bappeda Kota Blitar.

Wawancara dengan Imam Sholikin selaku Kasi Pemanfaatan Ruang Kota. Pada
Tanggal 11 November 2016 pukul 12.00 di Ruang Bagian Umum Dinas
PU dan Perumahan Kota Blitar

Wawancara dengan Kenyo Agung Popularita selaku Kepala Sub-Bidang
Lingkungan Hidup. Pada Tanggal 17 November 2016 pukul 09.35 di
Ruang Tamu Bappeda Kota Blitar

Website

www.blh.blitarkota.go.id

www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8105

<http://www.blitarkota.go.id/>

<https://www.timesindonesia.co.id/baca/108883/20151119/142302/kelurahan-ini->

[masuk-daerah-termiskin-di-kota-blitar/](#)

Wartapostonline.com/kota-blitar-raih-adipura-dua-belas-kali-berturut-turut

